



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA
SURABAYA TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT,
KETERANGAN BAWASLU, DAN PENGESAHAN ALAT
BUKTI)
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 2 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota Surabaya Tahun 2020

PEMOHON

- Yusuf Widyatmoko dan Muhammad Riza Aziziy (87/PHP.BUP-XIX/2021)
- Machfud Arifin dan Mujiaman (88/PHP.KOT-XIX/2021)

TERMOHON

- KPU Kabupaten Banyuwangi
- KPU Kota Surabaya

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Selasa, 2 Februari 2021, Pukul 11.04 WIB – 12.56 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

**Mardian Wibowo
Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 87/PHP.BUP-XIX/2021:

Ikhwan Fahrojih

B. Termohon Perkara Nomor 87/PHP.BUP-XIX/2021:

Dian Mardiyanto

C. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 87/PHP.BUP-XIX/2021:

Miftahul Huda

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 87/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Wakit Nurohman
2. M. Yusuf Febri Budiyanoro

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 88/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Machfud Arifin
2. Mujiaman

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 88/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Veri Junaidi
2. Donal Fariz

G. Termohon Perkara Nomor 88/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Agus Turcham
2. Soeprayitno
3. Naafilah Astri Swarist

H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 88/PHP.KOT-XIX/2021:

Sri Sugeng Pujiatmiko

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 88/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Tomuan Sugianto Hutagaol
2. Bagus Andri Dwi Putra
3. Arif Budi Santoso

J. BAWASLU:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Hasyim Wahid | (Bawaslu Kab. Banyuwangi) |
| 2. Hamim | (Bawaslu Kab. Banyuwangi) |
| 3. Joyo Adi Kusumo | (Bawaslu Kab. Banyuwangi) |
| 4. Anang Lukman Afandi | (Bawaslu Kab. Banyuwangi) |
| 5. Adrian Y. Pake | (Bawaslu Kab. Banyuwangi) |
| 6. Agil Akbar | (Bawaslu Kota Surabaya) |
| 7. Hadi | (Bawaslu Kota Surabaya) |
| 8. Usman | (Bawaslu Kota Surabaya) |
| 9. Hidayat | (Bawaslu Kota Surabaya) |
| 10. Yaqub Baliyya Al Arif | (Bawaslu Kota Surabaya) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.04 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 88/PHP.KOT-XIX/2021 dan 87/PHP.BUP-XIX/2021, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, sama dengan persidangan yang pertama. Persidangan yang kedua ini durasinya juga sangat harus singkat, memenuhi protokol kesehatan, sehingga Para Pihak ... ini ada tiga Pihak yang harus kita dengar, makanya kita harus efisien menyampaikannya, ya.

Baik, saya perkenalkan dulu, Pemohon 87/PHP.BUP-XIX/2021?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Perkara 87/PHP.BUP-XIX/2021, saya Ikhwan Fahrojih sebagai Kuasa Pemohon, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara 88/PHP.KOT-XIX/2021?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: VERI JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: VERI JUNAIDI

Perkenalkan, Kuasa dari Pemohon Perkara 88/PHP.KOT-XIX/2021, Veri Junaidi dan Donal Fariz hadir dalam persidangan. Dan Pemohon Prinsipal secara daring, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang Termohon 87/PHP.BUP-XIX/2021, siapa yang hadir?

8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Miftahul Huda. Yang hadir juga Prinsipal Pak Dian Mardiyanto, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Termohon 88/PHP.KOT-XIX/2021?

10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUDJIATMIKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUDJIATMIKO

Kami selaku Kuasa Hukum KPU Surabaya. Saya, Sri Sugeng Pudjiatmiko dan yang hadir Prinsipal Agus Turcham selaku Anggota KPU Kota Surabaya. Dan melalui daring, Saudara Soeprayitno (Divisi Teknis Penyelenggaraan) dan Naafillah Astri Swarist (Anggota KPU Kota Surabaya). Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pihak Terkait 87/PHP.BUP-XIX/2021?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: WAKIT NUROHMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir Kuasa Hukum Pihak Terkait atas nama Wakit Nurohman, S.H. dan Muhammad Yusuf Febri Budiyantoro, S.H. Kemudian, yang hadir melalui daring, teman-teman dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPD PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pihak Terkait 88/PHP.KOT-XIX/2021?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: TOMUAN SUGIANTO HUTAGAOL

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait, yang hadir Kuasa Hukum atas nama Tomuan Sugianto Hutagaol, S.H. dan Bagus Andri Dwi Putra, S.H. Dan yang ikut secara daring, rekan kami Arif Budi Santoso, S.H., yang juga nanti secara daring akan membacakan dari ... keterangan dari Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang membacakan yang secara daring?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: TOMUAN SUGIANTO HUTAGAOL

Ya, Yang Mulia. Karena kami hari ini mempersiapkan alat-alat bukti dan baru hari ini kami serahkan keterangan dari Pihak Terkait beserta semua alat-alat buktinya.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang alat buktinya, sudah?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: TOMUAN SUGIANTO HUTAGAOL

Sudah kami serahkan, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Kenapa yang membacakan, kok lewat daring? Kok enggak yang luring?

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: TOMUAN SUGIANTO HUTAGAOL

Ya karena kita bagi tugas, Yang Mulia. Tadi kita mempersiapkan untuk persiapan semua alat-alat bukti.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, semestinya lebih bagus bagus yang hadir secara luring itu yang menyampaikan. Kemudian, kalau ada tambahan, bisa yang secara daring, begitu, ya. Lain kali kalau ada persidangan berikutnya, begitu, ya?

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: TOMUAN SUGIANTO HUTAGAOL

Siap, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Meskipun belum tentu ada sidang berikutnya. Tapi bagi siapa pun, kehadiran luring itu diharapkan yang memberikan keterangan.

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: TOMUAN SUGIANTO HUTAGAOL

Siap, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kuasanya, ya?

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: TOMUAN SUGIANTO HUTAGAOL

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dalam pemeriksaan saksi, dan lain, atau tambahan, bisa saja yang secara luring, tapi yang pokok itu yang hadir di sini.

Ya. Bawaslu Perkara 87/PHP.BUP-XIX/2021?

30. BAWASLU: HASYIM WAHID (KAB. BANYUWANGI)

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi. Yang hadir dalam kesempatan ini, saya Hasyim Wahid dan Hamim. Sedangkan yang hadir dalam daring, ada Pak Anang Lukman Afandi, ada Pak Joyo, dan ada Pak Adrian Yansen Pale. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Bawaslu 88/PHP.KOT-XIX/2021?

32. BAWASLU: AGIL AKBAR (KOTA SURABAYA)

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Kota Surabaya, saya Muhammad Agil Akbar secara luring bersama Bapak Hadi Margo Sambodo. Secara daring, Saudara Yaqub Baliyya Al Arif, Saudara Hidayat, dan Saudara Usman. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Jadi, tadi sudah saya sampaikan. Yang disampaikan dalam persidangan ini pokok-pokoknya, ya. Kemudian, dokumen tertulis sudah disampaikan kepada semua pihak, sehingga dokumen tertulis itu dianggap sudah diketahui seluruhnya, ya. Yang tidak dibacakan, dianggap telah dibacakan.

Baik, sekarang Termohon Perkara 87/PHP.BUP-XIX/2021 dulu. Silakan! Saya pandu dulu di depan supaya ... apa ... bisa lebih efisien.

34. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Saudara mengajukan Eksepsi?

36. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Kami mengajukan Eksepsi, Yang Mulia. Jadi karena ini ... karena kami anggap penting, jadi kami akan sedikit menyampaikan pokok-pokok pikiran yang terkait dengan Eksepsi yang kami ajukan. Karena kami memohon bahwa untuk perkara ini diputus dalam putusan dismissal. Dan menurut kami bahwa (...)

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya ... ya nanti (...)

38. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Ya, itu, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa Anda itu, kok kesusu saja, minta diputus dismissal?

40. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, belum tentu dikabulkan, kan?

42. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Ya, siap, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang (...)

44. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Yang pertama (...)

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Eksepsinya tentang apa?

46. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Terkait dengan kewenangan, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa kewenangnya?

48. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Jadi, perkara ini bukan merupakan kewenangan Mahkamah karena terkait perselisihan hasil pemilihan yang itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan suara dan penetapan calon terpilih, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus, yang kedua, Eksepsinya?

50. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Kemudian yang kedua, terkait dengan Legal Standing (...)

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa Legal Standing? Enggak punya, Pemohon?

52. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Jadi, dari ketentuan ... dari jumlah penduduk yang ada di Banyuwangi itu sekitar=1.750.933. Jadi, ketentuan ambang batasnya=0,5%.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

54. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Jadi (...)

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Padahal selisih antara Pemohon dan Pihak Terkait, berapa?

56. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Selisih itu=40.733, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau dipersenkan, berapa berarti?

58. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Jadi, kalau 0,5%-nya itu=4.184.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Padahal selisihnya berapa ... berapa persen?

60. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Jadi ... jadi, itu sangat jauh (...)

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sangat jauhnya berapa persen? Mestinya setengah persen ... 0,5%, tapi ini selisihnya jauh. Jauhnya berapa persen? Ha?

62. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

4% lebih, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berapa?

64. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

4% lebih.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Masa? Ya, sudah. Jadi, dia ... Anda mengatakan bahwa (...)

66. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Jadi (...)

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak punya Legal Standing?

68. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Betul, Yang Mulia. Jadi, kami anggap bahwa selisih suaranya=40.734, tapi ketentuan 0,5%-nya itu=4.184, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus, Eksepsi yang lain ada ... masih?

70. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Itu, jadi ... kemudian (...)

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini yang tidak punya Legal Standing. Terus, yang lain lagi Eksepsinya tentang apa? Ada?

72. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Tentang error in objecto, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa error?

74. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Jadi, ini ada ... ada keputusan perbaikan terhadap Keputusan KPU Nomor 94, Yang Mulia. Tapi untuk perka ... keputusan KPU yang memperbaiki itu tidak dimasukkan dalam objek Permohonan, tidak di-juncto-kan. Jadi, kami anggap bahwa (...)

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya tegaskan. Yang dimohonkan oleh Pemohon itu untuk dibatalkan yang menjadi objek itu, putusan nomor berapa?

76. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Nomor 947, Yang Mulia.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nomor 947. Sekarang KPU memutuskan pakai nomor berapa?

78. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Jadi, Nomor 947, cuma ada perbaikan, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perbaikannya?

80. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Nomor 948/HK03.1 dan seterusnya Tahun 2020, Yang Mulia.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kapan itu perbaikannya?

82. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Itu 1 hari ... saat itu juga, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu ... perbaikan itu diumumkan di laman KPU-nya, enggak?

84. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Diumumkan, Yang Mulia.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Benar, KPU? Ada buktinya itu? Ini hal yang krusial, lho, ini.

86. TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: DIAN MARDIYANTO

Diumumkan, Yang Mulia.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Diumumkan? Di laman KPU?

88. TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: DIAN MARDIYANTO

Ya.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan diketahui oleh Pemohon juga atau Pihak Terkait?

90. TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: DIAN MARDIYANTO

Yang pasti sudah diumumkan, Yang Mulia.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa, kok ada perbaikan?

92. TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: DIAN MARDIYANTO

Ada kesalahan penulisan hari. Jadi, penetapan hasilnya itu melewati 5 menit dari pukul 00.00 WIB. Kalau tanggalnya sudah sesuai, hanya harinya yang belum di ... ini ... ternyata belum disesuaikan waktu itu. Jadi, penetapan hasil itu dimulai hari Rabu, selesai itu hari Kamis, pukul 00.05 WIB.

Nah, untuk di SK Nomor 947 itu sudah (...)

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, tanggal dan harinya juga berubah kalau begitu, kan?

94. TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: DIAN MARDIYANTO

Hanya kesalahan penulisan hari, Yang Mulia.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

96. TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: DIAN MARDIYANTO

Jadi, sudah di (...)

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, begini. Pada waktu Anda memutus Perkara Nomor 947 itu, masih menganggap harinya hari apa, tanggal berapa?

98. TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: DIAN MARDIYANTO

Harinya yang Nomor 947 hari Rabu, tanggal 17 (...)

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT

17.

100. TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: DIAN MARDIYANTO

Pukul 00.05 WIB.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi ternyata dalam faktanya, waktu melakukan penetapan sudah lewat dari tanggal itu, hari itu?

102. TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: DIAN MARDIYANTO

Yang benar (...)

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena jamnya sudah lebih dari pukul 00.00 WIB, sudah lebih dari situ? Lebih berapa menit?

104. TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: DIAN MARDIYANTO

Yang benar hari Kamis, tanggal 17, Yang Mulia.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hari ... 17. Terus, itu direvisi melalui putusan ... eh, ketetapan atau ... sori, Putusan Nomor 948?

106. TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: DIAN MARDIYANTO

Benar, Yang Mulia.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lah, Nomor 947 itu, apa?

108. TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: DIAN MARDIYANTO

Sama, Yang Mulia.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

110. TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: DIAN MARDIYANTO

Penetapan hasil rekapitulasi.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Isinya sama?

112. TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: DIAN MARDIYANTO

Sama. Yang Nomor 948-nya hanya perbaikan di hari.

113. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Perbaiki hari, Yang Mulia.

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, oke.

115. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Hanya perbaikan hari.

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hanya perbaikan hari.

117. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Kemudian, untuk yang Nomor 948 itu menyatakan bahwa surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Kabupaten Banyuwangi Nomor 947, Yang Mulia.

118. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Berarti Anda mengatakan Permohonan Pemohon itu error in objecto karena masih menggunakan nomor yang lama, Nomor 947?

119. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Seharusnya menurut kami di-juncto-kan, Yang Mulia.

120. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, baik. Terus apa lagi? Ada Eksepsi?

121. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Untuk Eksepsi, sudah, Yang Mulia.

122. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

123. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Untuk Eksepsi sudah. Kemudian, kami akan menyampaikan pokok-pokok (...)

124. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, ini juga masih ada halaman 17.

125. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

126. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Permohonan tidak jelas atau kabur? Itu (...)

127. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

128. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, sekarang Pokok Permohonan. Dalam Pokok Permohonan?

129. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Dalam Pokok Permohonan (...)

130. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pokok-pokoknya saja. Apa?

131. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Jadi, kami menanggapi terkait dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan rujukan oleh Pemohon yang itu diputuskan tahun 2008 sampai sebelum tahun 2014, Yang Mulia.

132. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh, kenapa?

133. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Jadi, menurut kami bahwa ... tidak serta-merta bahwa putusan-putusan Mahkamah yang dilahirkan melalui terobosan Mahkamah yang terdahulu itu bisa diterapkan oleh Mahkamah untuk ... dalam mengadili perkara a quo karena (...)

134. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu halaman 21, 22, dan seterusnya itu?

135. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Baik. Betul, Yang Mulia.

136. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

137. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Kemudian untuk (...)

138. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 24 sekarang?

139. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Untuk yurisprudensi yang sudah dilahirkan Mahkamah itu, juga sudah banyak diakomodir di dalam ketentuan Undang-Undang Pemilihan mengenai unsur-unsur TSM, Yang Mulia.

140. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

141. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Kemudian, mengenai putusan Mahkamah yang juga dijadikan rujukan oleh Pemohon terkait putusan pilkada dalam Pilkada Serentak Tahun 201. Itu menurut kami bahwa itu tidak relevan dengan perkara a quo, Yang Mulia. Karena dari kaidah-kaidah hukum yang dilahirkan dalam putusan-putusan tersebut, itu tidak ... tidak ada kondisi yang ... yang ... yang dalam perkara ini, itu memenuhi syarat itu. Misalkan, antara lain bahwa ketentuan ambang batas itu bisa dikesampingkan dalam hal adanya ... hasil rekap ini belum selesai, belum final, belum dihitung secara tuntas. Nah, dan itu tidak ada di dalam perkara a quo (...)

142. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

143. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Jadi untuk Perkara Banyuwangi, rekap mulai tingkat (...)

144. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah selesai?

145. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Sudah selesai, Yang Mulia.

146. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus berikutnya?

147. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Kemudian, mengenai apakah ada rekomendasi yang tidak dilaksanakan? Di ... di kami tidak ada ... tidak ada ... tidak ada kondisi seperti (...)

148. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

149. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Yang ada dalam putusan-putusan itu, Yang Mulia.

150. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sudah cukup, ya? Yang lain sekarang dalilnya.

151. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Kemudian, mengenai pokok-pokok, dalil-dalil yang ... yang itu sudah masuk kepada fakta. Fakta yang diajukan, yang pertama itu terkait dengan bahwa (...)

152. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang kita sudah sampai halaman 35 itu.

153. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Ya, 35, Yang Mulia.

154. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

155. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Jadi, mengenai dalil Pemohon bahwa ada Bupati Kabupaten Banyuwangi menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor 2. Itu untuk tanggapan kami, Yang Mulia. Jadi, mengenai ada bansos APBD dan APBN mengenai Covid-19 berupa program bansos pemerintah pusat (...)

156. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

157. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Menurut kami ini bahwa ini tidak berkait dengan KPU Kabupaten Banyuwangi.

158. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

159. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Kemudian, kami juga tidak menerima informasi mengenai adanya dugaan pelanggaran terkait bansos tersebut.

160. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

161. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Kemudian, tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi terkait hal tersebut.

162. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

163. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Itu, Yang Mulia.

164. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

165. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Kemudian mengenai ... juga kami singgung bahwa mengenai bansos, itu sebenarnya menjadi program pemerintah pusat dan tidak hanya di Banyuwangi saja, begitu.

166. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

167. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Kemudian, tidak ada ketentuan (...)

168. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini kok ... anu ... KPU kok tahu itu? Wah, lumayan ini Pihak Terkait dibantu ini malah.

169. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Kemudian, tidak ada ketentuan pun yang mengharuskan bahwa seorang kepala daerah ketika ada anggota keluarga yang mencalonkan diri itu harus mengundurkan diri.

170. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

171. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Itu. Kemudian, yang kedua di huruf b halaman 37.

172. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

173. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Mengenai pencairan insentif RT/RW pada wilayah Kecamatan Gambiran. Ini juga ... pada intinya juga sama dengan yang tadi, Yang Mulia. Bahwa tidak ada laporan, tidak ada informasi mengenai pelanggaran (...)

174. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, berarti kalau begitu yang c, yang mengenai insentif guru ngaji juga enggak ada, ya?

175. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Betul, Yang Mulia.

176. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian, yang d?

177. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Kemudian yang d, pencairan insentif pada guru ngaji se-Kabupaten Banyuwangi juga kondisinya sama, Yang Mulia.

178. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini sama ini. Terus, kemudian?

179. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Terkait dengan proyek infrastruktur APBD untuk pemasangan paving, juga pada intinya sama, Yang Mulia. Jadi, tidak terkait dengan KPU ... KPU Banyuwangi.

180. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ini yang f ini yang penting ini, saya minta klarifikasi. Kegiatan silaturahmi itu ada isinya kampanye enggak, Menurut Pemohon, oleh Bupati Banyuwangi? Karena dia, kan bisa saja kegiatan silaturahmi itu diisi kampanye untuk mendukung pasangan calon. Bagaimana itu yang halaman 1 itu? Ha? Coba, di ... anu ... sampaikan! Ha? Termohon? Kok terus diam, Termohon, kenapa?

181. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Baik ... baik, Yang Mulia. Jadi, terkait dengan adanya kegiatan silaturahmi tokoh lintas agama juga pada dasarnya kita tidak menerima laporan mengenai hal tersebut, Yang Mulia. Apakah mengenai hal ini ada laporan dari pihak paslon-paslon terkait pelanggaran ... adanya pelanggaran ini, kita juga ... karena tidak ada laporan dan juga tidak ada rekomendasi terkait itu. Jadi, kami tidak bisa merespons, Yang Mulia.

182. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terus yang mengenai itu, Anda dituduh tidak adil dan tidak profesional, gimana itu?

183. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Jadi, terkait dengan tabel yang disampaikan oleh Pihak Pemohon, ada 17 pelaporan. Yang pada dasarnya ... ini bukan 17, tapi 16. Ini kami sampaikan bahwa dari beberapa laporan ini yang ada penerusan ke pihak kami, ke Pihak Termohon, itu hanya 3, Yang Mulia. Jadi, hanya 3 laporan, sudah kita sampaikan di sini. Untuk yang selain 3 itu, tidak ada informasi, Yang Mulia. Tidak ada informasi dan tidak ada penerusan mengenai adanya dugaan pelanggaran tersebut ke Pihak KPU Banyuwangi.

184. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

185. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Kalau ... kalau yang ada penerusan perlu kami sampaikan, Yang Mulia. Jadi yang ... jadi untuk di TPS 3 Desa Blimbingsari, itu Pemohon

mendalilkan bahwa ada dukungan dari KPPS dengan mengacungkan 2 jari. Jadi itu ... itu faktanya ... faktanya, itu tidak hanya dukungan dengan mengacungkan 2 jari, Yang Mulia. Jadi, ada yang ada 1 jari juga, Yang Mulia. Jadi kami ... kami di dalam jawaban, di dalam pembuktian, kami sertakan juga foto ... foto yang ... yang ... yang membuktikan bahwa tidak hanya dukungan terhadap salah satu, tapi juga terhadap keduanya. Dan mengenai pelanggaran tersebut, sudah dari Pihak Termohon sudah memberikan sanksi dan juga memberi ... melarang pada saat pemungutan suara.

186. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

187. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Melarang ... melarang.

188. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, sekarang yang jadi ... saya ... pertanyaan saya begini, apakah ada laporan kepada DKPP bahwa Termohon itu tidak profesional, tidak adil, dan memihak? Ada, enggak?

189. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Tidak ada, Yang Mulia.

190. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak ada. Baik, nanti Bawaslu, ya. Coba dianu, jawab juga. Itu sudah sampai ke halaman 48.

191. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Baik, Yang Mulia.

192. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang halaman 48 yang C, itu apa itu?

193. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Ini sama, Yang Mulia. Jadi, ada 3 poin yang disampaikan oleh Pemohon. Jadi, petugas KPPS TPS 3 Desa Blimbingsari, Kecamatan Blimbingsari. Terus kemudian, B, di Desa Gitik ... TPS 5 di Desa Gitik. Kemudian, C, TPS 14 di Desa Sembulung. Ini pada dasarnya sama, Yang Mulia (...)

194. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

195. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Dengan laporan yang tadi.

196. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

197. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Laporan yang 3 itu yang ada penerusan ke KPU (...)

198. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

199. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Sudah ... sudah ada penerusan dan sudah ada sanksi. Kemudian, petugas KPPS yang dianggap melanggar itu sudah (...)

200. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dilatih?

201. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Dilarang pada saat itu juga untuk menjalankan tugasnya.

202. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Berarti sudah selesai.

203. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Berarti yang sudah selesai, Yang Mulia, untuk (...)

204. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang Petitumnya. Petitumnya halaman 51.

205. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Permohonan a quo.
4. Menyatakan Permohonan Pemohon salah objek (error in objecto).
5. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
6. Menyatakan Permohonan Termohon[Sic!] tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 947.

206. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang anu ada ... sebentar ... sebentar!

207. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Mohon maaf, Yang Mulia.

208. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu ... sebentar! Ada salah ketik, ya, itu? Yang Eksepsi nomor 6 itu, apa itu? Coba, dibaca itu!

209. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Menyatakan Permohonan Pemohon, Yang Mulia. Jadi, mohon direnvoi, Yang Mulia. Bukan (...)

210. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anunya enggak ada, ya?

211. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Bukan Permohonan ... bukan Permohonan, tapi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, Yang Mulia.

212. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berarti kelebihan *an* itu, ya?

213. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Ya, baik, Yang Mulia.

214. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, ya. Terus, dilanjutkan!

215. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Untuk angka 3 dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 947 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul 00.05 WIB juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 948 dan seterusnya tentang Perbaikan Keputusan KPU Nomor 947 (...)

216. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dan seterusnya (...)

217. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Dan yang seterusnya, Yang Mulia.

Tiga. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

218. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pasangan Nomor 1, dapat berapa?

219. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Satu ... Pasangan Nomor 1 dapat 398.113.

220. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pasangan Nomor 2?

221. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Untuk pasang ... untuk Ibu Fiestian ... Fiestiandani (...)

222. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak usah disebut, Pasangan Nomor 2 saja.

223. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

43 ... 4 ... 4.380 ... eh, 438.847, Yang Mulia.

224. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, total?

225. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Total 836.960.

226. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

227. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Atau apabila (...)

228. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi kenapa (...)

229. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum KPU Banyuwangi.

230. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ya, sudah cukup. Prof. Saldi, ada? Silakan!

231. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Kuasa Pemohon, tadi Saudara mengatakan bahwa fakta yang benar itu di TPS itu yang mengacungkan 2 jari ... tidak hanya 2 jari, tapi ada 1 jari juga, ya?

232. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Betul, Yang Mulia.

233. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi faktanya itu ada, ya?

234. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Fakta. Fakta di tiga lokasi itu, Yang Mulia.

235. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di tiga TPS?

236. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Tiga TPS yang di ... masuk di tabel Pemohon.

237. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, ada buktinya di situ?

238. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Ada buktinya, kami sertakan foto-fotonya. Kemudian, terkait dengan sanksinya. Kemudian, terkait sanksi ... sanksi terkait dengan larangan untuk melaksanakan tugas pada saat itu juga. Kemudian, sanksi kode etik, Yang Mulia. Ada tiga bukti itu.

239. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, nanti kami cek.

Yang kedua. Ada 16 rekomendasi atau laporan, ya? Tapi, Anda katakan cuma tiga yang sampai ke KPU, ya?

240. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Betul, Yang Mulia.

241. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu ada diuraikan di halaman 43, 44, sampai kemudian halaman 46. Yang lain itu enggak sampai ke KPU, ya? Atau berhentinya di Bawaslu?

242. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Di Bawaslu, Yang Mulia.

243. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, nanti kita tanya ke Bawaslu.

Nah, pertanyaan berikutnya. Itu ada ... apa namanya ... poin yang dari catatan saya awal, ya. Yang tadi soal yang belum dijelaskan. Soal bantuan Covid dan bansos dalam APBD. Lalu kemudian, ada yang ditempelkan stiker calon bupati yang menang, ya, peraih suara nomor ... Nomor 2. Di mana itu dijelaskan dalam ... apa ... di dalam jawaban Saudara?

244. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Pada prinsipnya, kami tidak ada laporan terkait itu, Yang Mulia. Jadi, kami tidak bisa menjawab.

245. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan, ini kan ada didalilkan oleh Pemohon. Siapa yang harus menjawab itu? Masa Hakim MK yang mau menjawab? Anda baca Permohonan, enggak?

246. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Baca, Yang Mulia. Kalau terkait dengan pemasangan paving, di dalam jawaban kami hanya menyampaikan bahwa terkait yang ... bahwa kami tidak menerima informasi itu (...)

247. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

KPU, itu apa yang bisa Anda jelaskan tentang itu?

248. TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: DIAN MARDIYANTO

Baik, Yang Mulia. Pada dasarnya, KPU tidak tahu-menahu terkait dengan masalah itu. Karena memang pertama, tidak ada informasi atau pun rekomendasi secara tertulis atau pun lisan dari Bawaslu. Kalau

menurut sepengetahuan saya pribadi, lebih masuk ke hasil pengawasan sebenarnya, Yang Mulia.

249. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan. Anda mendalilkan, kan Pemohon, ya, soal itu, ya? Pemohon, itu dalil berapa itu? Karena saya catat di sini, lho. Jadi, Anda katakan di ... dilabeli stiker Calon Bupati Nomor 2.

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Di halaman 15, poin 11 (...)

251. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di Permohonan, ya?

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Di halaman 11, Yang Mulia.

253. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Halaman berapa?

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

11 sampai (...)

255. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Halaman 11 sampai?

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

13, Yang Mulia.

257. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

13. Nah, ini ... ini artinya ... terima kasih, ya. Artinya, belum ada Saudara jelaskan, ya?

258. TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: DIAN MARDIYANTO

KPU tidak tahu terkait masalah itu, Yang Mulia. Bahkan, kami baru mengetahui itu sejak membaca Perbaikan Permohonan dari Pemohon.

259. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Berarti Anda kan tahu, kan?

260. TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: DIAN MARDIYANTO

Belum tahu. Maksudnya, kejadiannya tidak ... tidak mengetahui.

261. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan, sebagai dalil, kan mestinya dijelaskan. Bahwa ini tidak benar ini, dan segala macamnya, gitu.

262. TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: DIAN MARDIYANTO

Sudah tertulis sepertinya.

263. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, nanti dicek. Pertanyaan berikutnya untuk KPU. Anda punya data, enggak, berapa saksi Paslon 1 yang tidak tanda tangan di TPS dan saksi Paslon 2 yang tidak tanda tangan hasil di TPS?

264. TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: DIAN MARDIYANTO

Sepengetahuan saya di TPS tanda tangan semua, Yang Mulia.

265. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, tanda tangan semua, ya?

266. TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: DIAN MARDIYANTO

Ya.

267. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bisa dicek, ya?

268. TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: DIAN MARDIYANTO

Ya. Jadi, tidak menandatangani itu pada saat rekap di kecamatan dan kabupaten.

269. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Pemohon, apakah saksi Anda tanda tangan di semua TPS?

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Kami telah mengajukan keberatan tingkat rekapitulasi kecamatan dan kabupaten, Yang Mulia.

271. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan, pertanyaan saya yang Anda jawab!

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Baik, Yang Mulia.

273. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di TPS, semua saksi Anda tanda tangan, enggak?

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Tanda tangan.

275. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Jadi jangan ... jangan orang Hakim tanya lain, Anda jawab lain, bagaimana ini? Kita mau mencari, mau mendudukkan soal ini secara benar bagaimana, ya.

Terima kasih, Pak Ketua.

276. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.
Yang Mulia Pak Manahan, ada? Ya, silakan!

277. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kepada Termohon, ya. Memang Termohon sudah ada menjelaskan di sini sekalian juga mengonfirmasi. Bahwa adanya keberatan dari Pemohon tentang kedekatan antara petahana dengan calon ... dengan Pemohon, ya? Namun, di sini keterangannya atau pun jawaban dari Termohon mengatakan bahwa tidak ada diperoleh secara bertingkat atau berjenjang dari mulai TPS, hingga PPK, maupun sampai tingkat kabupaten tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon atau pun kecurangan-kecurangan itu.

Nah, saya hanya juga mengonfirmasi kepada Pemohon, ya. Ini seperti dipertanyakan tadi oleh Yang Mulia Prof. Saldi. Memang tidak ada keberatan sama sekali, baik di TPS maupun di tingkat PPK, atau tingkat kabupaten mengenai soal tadi tuduhan ada pelanggaran, ya? Ada tentang ... apa namanya ... pelanggaran yang hubungannya dengan adanya pengaruh atau pun kedekatan antara Pihak Terkait dengan incumbent. Itu di mana di dalam Permohonan Saudara membuktikan adanya keberatan-keberatan Saudara itu? Ada buktinya, coba ditunjuk! Bukti P berapa?

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Mohon maaf, Yang Mulia, di dalam tabel 2.

279. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Laporan kami kepada Bawaslu di situ, termasuk di dalam proses rekapitulasi tingkat TPS, Yang Mulia, kami memasukkan (...)

281. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, ada di situ? Bentuk apa itu? Laporrannya dalam bentuk apa? Formulir D atau dalam bentuk apa?

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Kami melaporkan ke Bawaslu, Yang Mulia, sebagaimana (...)

283. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Laporan biasa gitu, ya?

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Di dalam P-10 kami, Yang Mulia.

285. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi ... P-10?

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

P-10, kemudian ada P-11.

287. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

P-11?

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

P-12, P-13, P-14, sampai ... P-10 sampai P-25, Yang Mulia.

289. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, bentuknya laporan biasa ke Bawaslu, ya?

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Betul, Yang Mulia.

291. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, terima kasih.

292. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, cukup. Terima kasih, KPU.
Masih ... masih ada, Yang Mulia? Cukup, ya?

293. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini ke ... ke Bawaslu. Dengan adanya tadi itu, bagaimana tanggapan Bawaslu memang ada tadi formil, ya, pengaduannya itu P-10, P-11, P-14, dan seterusnya, itu ada beberapa pengaduan. Itu sebenarnya bagaimana ditanggapi oleh Bawaslu? Apakah memang terbukti, atau ada rekomendasi, atau bagaimana kira-kira dari Bawaslu mengenai pengaduan atau laporan itu?

294. BAWASLU: HASYIM WAHID (KAB. BANYUWANGI)

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, terkait dari 16 dalil Pokok Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, itu semuanya sudah kita tindak lanjuti. Nah, khusus untuk yang dalam tabel 2 halaman 14 terkait dengan tidak mendapatkan surat pemberitahuan, sudah kita ... penanganannya sudah kita tindak lanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran, Yang Mulia.

295. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dan itu sudah ada dalam keterangan Bawaslu nanti, ya?

296. BAWASLU: HASYIM WAHID (KAB. BANYUWANGI)

Sudah. Sudah, Yang Mulia.

297. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, nanti saja kalau begitu.
Terima kasih, Yang Mulia.

298. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.
Cukup, ya, untuk KPU. Terima kasih.
Sekarang Pihak Terkait, pokok-pokoknya saja. Silakan!

299. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: WAKIT NUROHMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

300. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

301. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: WAKIT NUROHMAN

Berkaitan dengan agenda jawaban Pihak Terkait pada hari ini, kami selaku Kuasa Hukum Pihak Terkait akan menyampaikan beberapa hal pokok saja. Antara lain, dalam Eksepsi ada 2 poin, Yang Mulia.

302. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

303. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: WAKIT NUROHMAN

Berkaitan dengan Legal Standing dan berkaitan dengan ambang batas. Berkaitan dengan Legal Standing ... berkaitan dengan Legal Standing, perolehan suara ... perolehan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 4,86%. Berdasarkan pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada ayat (2) huruf d itu, disampaikan bahwa ... disampaikan bahwa perbedaan paling banyak sebesar 0,5%. Faktanya, di dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi selisih suaranya lebih dari 0,5%.

Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak mempunyai ... tidak mempunyai Kedudukan Hukum atau Legal Standing.

304. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

305. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: WAKIT NUROHMAN

Kemudian, yang kedua mengenai ambang batas. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa (...)

306. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bisa mengimbangi ambang batas?

307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: WAKIT NUROHMAN

Ya.

308. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa? Responsnya, gimana?

309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: WAKIT NUROHMAN

Berkaitan dengan ambang batas, menurut Pihak Terkait berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, contohnya di Kabupaten Intan Jaya itu, ambang batas dapat (ucapan tidak terdengar jelas) sepanjang adanya force majeure atau dan lain sebagainya.

Faktanya, di dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi berlangsung sangat aman, kondusif, dan sampai rekapitulasi hasil tingkat kabupaten berjalan sangat aman. Buktinya adalah pasangan ... saksi pasangan calon, baik Nomor 01 dan Pihak Terkait menandatangani Berita Acara tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk dapat mengesampingkan ambang batas sebagaimana pada dalil Permohonan Pemohon.

310. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang Pokok Permohonan.

311. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: WAKIT NUROHMAN

Dalam Pokok Permohonan, ada beberapa hal penting yang kami sampaikan, Yang Mulia. Satu, berkaitan dengan dalil TSM yang disampaikan oleh Pemohon. Menurut kami, tidak beralasan menurut hukum.

312. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa?

313. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: WAKIT NUROHMAN

Karena satu, berkaitan dengan pelanggaran TSM, itu harus dapat dibuktikan dulu melalui di Bawaslu. Faktanya, di dalam ... faktanya di dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi tidak ada putusan Bawaslu yang berkekuatan hukum tetap mengenai TSM yang dalilkan oleh Pemohon.

Kemudian yang kedua, mengenai TSM juga. Berdasarkan survei dari beberapa lembaga survei yang ada di Kabupaten Banyuwangi, contohnya dari LSI, kemudian Pusdeham, dan SMRC. Pada survei bulan November 2020, semuanya ... semuanya hasil dari survei itu menyatakan bahwa elektabilitas Pihak Terkait itu semuanya unggul ... semuanya unggul.

314. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan.

315. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: WAKIT NUROHMAN

Oleh karena itu, mengenai TSM, menurut Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum.

Kemudian mengenai program, Yang Mulia. Mengenai program yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa program yang tertera dalam APBD dan ... maupun perubahan, itu kan ... itu berdasarkan nomenklatur atau dalam birokrasi pemerintahan. Apalagi Pihak Terkait ada di dalam ... apalagi ... mohon maaf koreksi, apalagi Pemohon ada di dalam sebagai wakil penanggung jawab tim anggaran. Jadi dalam hal ini, Pemohon pasti paham mengenai hal ini.

Kemudian yang ketiga, yang berikutnya mengenai bantuan Covid. Itu sama sekali tidak ada gambar dari Pihak Terkait, yang ada hanya gambar logo dari Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi karena ini ... karena sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Banyuwangi.

Berkaitan dengan dalil Pemohon tanggal 7 Oktober yang di pendopo itu, sama sekali tidak benar. Karena faktanya, pada tanggal 7 Oktober 2020 itu, Bupati Banyuwangi mengundang tokoh agama untuk menyosialisasikan berkaitan dengan protokol kesehatan, khususnya di tempat ibadah. Bukti terlampir, Yang Mulia.

316. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

317. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: WAKIT NUROHMAN

Berkaitan dengan dalil yang lain mengenai (...)

318. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar! Ini ada dari Prof. Saldi.

319. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Mohon maaf, itu yang 7 Oktober itu di dalil ... apa ... penjelasan Saudara di angka 27, bukti berapa itu?

320. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: WAKIT NUROHMAN

Itu Bukti PT-14.

321. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

PT-14, oke.

322. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang di bawah itu.

323. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, jadi ini dipisah, ya?

324. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: WAKIT NUROHMAN

Ya.

325. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

27. Padahal 27, 27 ini sama poinnya.

326. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: WAKIT NUROHMAN

Sama saja.

327. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Anda mengelirukan, mau menipu Hakim juga saya lihat ini. Enggak, ya?

328. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: WAKIT NUROHMAN

Bukan, Yang Mulia. Jadi, saya menarasikan jangan sampai kemudian kalimat itu panjang-panjang, Yang Mulia.

329. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jangan serius betul ditanggapinya.

330. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: WAKIT NUROHMAN

Siap, siap.

331. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dilanjutkan!

332. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: WAKIT NUROHMAN

Kemudian, dalil mengenai guru ngaji dan lain sebagainya, itu juga tidak beralasan menurut hukum, Yang Mulia. Karena dasarnya adalah surat kesepakatan bersama menteri dalam ... surat kesepakatan bersama antara Menteri Agama dan Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan itu, dan kemudian ditindaklanjuti dengan dana hibah dari Kabupaten Banyuwangi, dan itu sudah berlangsung mulai tahun 2017. Oleh karena itu, dalil yang ... dalil Pemohon mengenai hal itu tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus ditolak.

Kemudian, mengenai proyek dan lain sebagainya. Itu menurut Pihak Terkait juga tidak beralasan menurut hukum karena ada atau tidaknya Pilkada Tahun 2020 (...)

333. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Proyek dan program itu jalan?

334. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: WAKIT NUROHMAN

Ya.

335. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Kalau begitu, kita langsung Petitum.

336. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: WAKIT NUROHMAN

Petitum. Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut.

Satu. Menolak ... menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Termohon, Yang Mulia.

337. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

338. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: WAKIT NUROHMAN

Terima kasih.

339. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Ya, silakan! Sebentar, Yang Mulia! Saya senang mendengarkan ini, soalnya bahasa Jawanya medok, senang saya. Lama enggak mendengar itu saya di Jakarta.

340. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: WAKIT NUROHMAN

Siap, siap.

341. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Prof. Saldi!

342. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih. Saudara Pihak Terkait, ini kan di Petitem Saudara yang poin 2 itu menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Nomor 947 itu, padahal ini sudah dikoreksi ini, kan? Bagaimana Anda menjelaskannya ini?

343. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: WAKIT NUROHMAN

Mohon izin, Yang Mulia. Berkaitan dengan SKKB ... SK Termohon tersebut, memang saksi kami di ... di KPU itu sudah mendapatkan pemberitahuan itu ... mengenai hal itu. Cuma sampai tadi malam, itu saya tunggu untuk berkas itu datang untuk menjadi tambahan alat bukti, itu tidak sampai, sampai hari ini. Jadi, kalau seandainya kami (...)

344. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bapak, pertanyaan saya begini. Sebagai Pihak Terkait, Anda tahu enggak bahwa ini ada perubahan?

345. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: WAKIT NUROHMAN

Tahu, Yang Mulia. Cuma, kan saksi kami di KPU itu sudah mendapatkan itu. Cuma kalau saya minta lagi kepada Termohon, jawaban Termohon, "Sudah diberikan kepada saksinya." Pihak Terkait sampai tadi pagi ini saya ... kita tunggu untuk memasukkan dalil ini dan untuk kita lampirkan sebagai barang bukti ... sebagai alat bukti, belum sampai, Yang Mulia, sampai persidangan hari ini. Sehingga (...)

346. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Enggak, artinya, dasar yang Anda gunakan itu sama dengan yang digunakan Pemohon? Nah, dua-duanya dibantah tadi. Itu dibantah oleh Termohon.

347. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: WAKIT NUROHMAN

Sebenarnya, akan kami tambahi untuk dalil itu, mengenai surat itu, namun, kan kalau saya (...)

348. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya menunggu tadi sebetulnya. Anda ini, kan ... apa saja ... apa namanya ... beralih saja. Paling tidak lisan sebelum saya tanya, harusnya sudah Saudara sebutkan tadi.

349. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: WAKIT NUROHMAN

Bagaimana, Yang Mulia?

350. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Enggak. Kalau tidak tertulis, kan Anda bisa disampaikan lisan. Lisannya pun tidak tersebut oleh Saudara tadi.

351. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: WAKIT NUROHMAN

Karena kami tidak memegang alat buktinya, Yang Mulia, sampai persidangan ... persidangan hari ini, saya tunggu masih belum sampai.

352. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Tapi sudah disebut oleh Termohon tadi, kan?

353. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: WAKIT NUROHMAN

Siap. Karena sudah di ... terwakil oleh Termohon dan (...)

354. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Enggak bisa, lho. Anda enggak bisa terwakil oleh Termohon, gimana mau terwakili? Masa Anda diwakili oleh ... apa (...)

355. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: WAKIT NUROHMAN

Bukan mengenai itu, Yang Mulia. Saya tidak membawa datanya, sehingga saya tidak berani untuk menyampaikan itu. Kecuali saya (...)

356. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, akan kami pertimbangkan fakta ini. Terima kasih, Pak Ketua.

357. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ada, Yang Mulia Pak Manahan? Cukup, ya? Baik. Terima kasih kepada Pihak Terkait.

Sekarang yang terakhir dari Pihak Bawaslu. Anda membuat ringkasan ini?

358. BAWASLU: HASYIM WAHID (KAB. BANYUWANGI)

Betul, Yang Mulia.

359. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Yang disampaikan ini saja?

360. BAWASLU: HASYIM WAHID (KAB. BANYUWANGI)

Inggih.

361. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ringkasan ini.

362. BAWASLU: HASYIM WAHID (KAB. BANYUWANGI)

Yang Mulia (...)

363. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan!

364. BAWASLU: HASYIM WAHID (KAB. BANYUWANGI)

Inggih. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang kami hormati (...)

365. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu dianggap dibacakan.

366. BAWASLU: HASYIM WAHID (KAB. BANYUWANGI)

Dianggap dibacakan.

367. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

368. BAWASLU: HASYIM WAHID (KAB. BANYUWANGI)

Satu. Bahwa hasil pengawasan atas Pokok Permohonan huruf a pada halaman 11 dalam Pokok Permohonan Pemohon mengenai Bupati Kabupaten Banyuwangi menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan pemerintah daerah untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, seperti dalil Pemohon pada angka 25 huruf a dan f. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dan jajarannya tidak pernah menerima laporan dan tidak pernah menemukan dugaan pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon. Sedangkan dalil Pemohon pada angka 25 huruf b, c, dan d, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dan jajarannya terdapat kegiatan pencairan insentif bagi Ketua RT/RW di Desa Wringinagung, Kecamatan Gambiran, tanggal 8 Desember 2020, dan pemberian insentif untuk guru ngaji di Kecamatan Kabat tanggal 12 November 2020, serta kegiatan yang sama juga dilakukan di Kecamatan Srono, Purwoharjo, Wongsorejo, dan Kalibaru. Namun, dari semua kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi tidak menemukan unsur kampanye pemilihan. Sebagaimana dapat dilihat pada halaman 2 dan 3 dalam keterangan tertulis kami.

369. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Itu dianggap dibacakan.

370. BAWASLU: HASYIM WAHID (KAB. BANYUWANGI)

Inggih.

371. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi, intinya tidak ada unsur itu, ya?

372. BAWASLU: HASYIM WAHID (KAB. BANYUWANGI)

Betul, Yang Mulia.

373. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus, yang kedua?

374. BAWASLU: HASYIM WAHID (KAB. BANYUWANGI)

Yang kedua. Bahwa hasil pengawasan atas Pokok Permohonan huruf b terkait Termohon dan pengawas pemilihan tidak profesional dan tidak adil, sesuai dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 28, tabel 2, halaman 14 tentang laporan kepada pengawas pemilihan. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sudah melakukan penanganan pelanggaran terhadap 16 perkara yang didalilkan. Ke-16 tersebut ... laporan tersebut dapat dikato ... dikategorikan menjadi 9 laporan jenis pelanggaran pidana pemilihan, 6 laporan pelanggaran kode etik, serta 1 laporan yang pokok pelanggarannya sama, sebagaimana dapat dilihat dalam keterangan tertulis kami mulai halaman 3 hingga 11.

Tiga. Bahwa terhadap Pokok Permohonan huruf c mengenai Termohon melakukan keberpihakan dan mendukung atau mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sudah menindaklanjuti ketiga laporan yang didalilkan Pemohon dengan melakukan upaya penanganan pelanggaran ke Petugas KPPS TPS 03 Desa Blimbingsari, TPS 05 Desa Gitik, Kecamatan Rogojampi, dan TPS 14 Desa Sembulung, Kecamatan Cluring. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi memutuskan telah terjadi pelanggaran kode etik dan menindaklanjuti dengan penyampaian surat penerusan pelanggaran kode etik kepada KPU Kabupaten Banyuwangi.

375. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Itu dianggap dibacakan. Ada, Prof, yang akan di ... Yang Mulia, Pak Manahan? Cukup?

Baik, kalau begitu keterangannya Bawaslu sudah cukup, ya.

376. BAWASLU: HASYIM WAHID (KAB. BANYUWANGI)

Terima kasih, Yang Mulia.

377. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah menyelesaikan Perkara Nomor 87/PHP.BUP-XIX/2021.

Sekarang kita teruskan dengan keterangan ... jawaban Termohon Perkara Nomor 88/PHP.KOT-XIX/2021. Saya persilakan, KPU-nya!

378. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Terima kasih, Yang Mulia. KPU Surabaya akan menyampaikan ... pertama, terkait dengan Eksepsi, Yang Mulia.

379. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

380. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya dengan menggunakan program kebijakan untuk pemenangan calon tertentu, antara lain ... mohon disebut ... mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

381. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

382. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Bahwa seluruh dalil itu tidak ada satu pun yang mendalilkan mengenai objek perkara perselisihan hasil pemilihan (...)

383. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sehingga kesimpulannya tidak berwenang, ya?

384. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Siap, Yang Mulia.

385. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus?

386. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Yang kedua, terkait dengan Kedudukan Hukum.

387. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

388. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Bahwa persentase selisih perolehan suara karena di Surabaya ada 2.959.082 jiwa, sehingga sebagaimana Pasal 158, nol koma persen.

389. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

390. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Nah, selisih antara pasangan calon dengan pasangan yang memperoleh suara terbanyak, itu sejumlah 145.746 suara, sedangkan ambang batas 0,5% itu hanya 5.247 suara.

391. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

392. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Sehingga selisihnya sekitar (...)

393. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lebih, ya?

394. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

13,8%, Yang Mulia.

395. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Melebihi Pasal 158?

396. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Betul, Yang Mulia.

397. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oleh karena itu, tidak punya Legal Standing?

398. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Legal Standing.

399. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus?

400. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Yang berikutnya, tenggang waktu menurut ... menurut Termohon itu memenuhi ketentuan (...)

401. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tenggang waktunya tidak di Eksepsi karena memenuhi, ya?

402. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Memenuhi Pasal 100 ... 157.

403. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang (...)

404. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Berikutnya, Yang Mulia, terkait dengan Pokok Permohonan yang (...)

405. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Permohonan.

406. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Tidak jelas, mohon dibacakan.

407. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dianggap dibacakan.

408. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Ya, Yang Mulia.

409. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, Permohonannya obscur menurut Saudara?

410. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Obscur, ya. Karena ada yang tidak selaras antara Posita dengan Petitum. Karena Positanya dia mendalilkan 700 ... apa ... 20 kecamatan, tetapi di Petitumnya dia meminta untuk PSU 31 kecamatan, seluruh TPS ... apa ... kecamatan di Kota Surabaya, sehingga tidak selaras dan konsisten, Yang Mulia.

411. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Sekarang Pokok Permohonan.

412. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Pokok Permohonan langsung ke halaman 17 angka 7, Yang Mulia.

413. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

414. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Terkait dengan seluruh proses Pilkada Kota Surabaya yang didalilkan oleh Pemohon bahwa bertentangan dengan hasil pemilihan ...

pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dan aspirasi rakyat dan (ucapan tidak terdengar jelas), tetapi hasil dari kecurangan TSM, Yang Mulia.

415. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

416. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Terkait dengan itu, maka KPU Surabaya sebagai Termohon menjawab sebagai berikut.

417. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

418. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, antara lain:

Bahwa Termohon telah memberikan fasilitasi kepada seluruh pasangan calon dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan.

Kedua. Bahwa Termohon telah memfasilitasi debat publik kepada seluruh pasangan calon.

Yang ketiga. Bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi di media cetak, elektronik, dan pemasangan alat peraga sosialisasi masing-masing pasangan calon kepada seluruh masyarakat Kota Surabaya dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020.

Yang keempat. Seluruh proses distribusi perlengkapan, pemilihan, atau perlengkapan lainnya telah terdistribusi dengan baik ke seluruh TPS-TPS di wilayah Kota Surabaya dengan koordinasi aparat kepolisian.

Yang kelima. Termohon beserta jajaran dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS telah menerapkan protokoler kesehatan secara ketat sebagaimana ditentukan.

Yang keenam. Seluruh proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya berjalan dengan tertib, aman, dan kondusif.

Selanjutnya, ke halaman 21, Yang Mulia, huruf e.

419. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

420. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Bahwa Pokok Permohonan Pemohon, tidak satu pun mendalilkan terkait dengan permasalahan proses pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, baik berkaitan dengan dugaan perubahan, atau penggelembungan, atau rekayasa perolehan suara. Maka dengan demikian, teknis pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan dibuktikan seluruh saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon telah menandatangani Formulir Model C-Hasil Salinan KWK, Formulir D-Hasil Salinan ... Formulir D-Hasil Kecamatan KWK, sebagaimana Bukti T-8 sampai dengan Bukti T-38. Serta model D-Hasil kabupaten/kota yang ditandatangani oleh saksi Pemohon yang bernama Rusli Effendi, sebagai bentuk persetujuan dan penerimaan seluruh hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon.

Berikutnya, Yang Mulia, ke halaman 28.

421. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

422. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, ada 1 TPS di TPS 46 Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang atas rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya Nomor 474 dan seterusnya Tahun 2020 perihal (...)

423. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu halaman berapa, itu?

424. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

28, Yang Mulia.

425. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha? Ini di tempat kita cuma ada 26, kalau enggak salah itu yang dibacakan di sini 24.

426. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Oh, ya.

427. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

428. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Maaf, Yang Mulia.
Ya, terkait dengan ... apa ... TPS di Kedurus, Yang Mulia.

429. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

430. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Angka 10 huruf b.

431. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, yang mana itu yang dibacakan, itu? Kok beda dengan yang kita terima? Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya ini, kan? Termohon, yang dibaca, ini?

432. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Ya, Yang Mulia.

433. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini, kan?

434. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Betul, Yang Mulia.

435. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halamannya kok beda?

436. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

21d.

437. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang mana itu?

438. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Di halaman 21b, Yang Mulia.

439. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

440. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Maaf, ini salah baca tadi. Saya lanjutkan, Yang Mulia.

441. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

442. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

TPS 6 Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang atas rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya Nomor 474 dan seterusnya Tahun 2020 Perihal Pemungutan Suara Ulang tertanggal 9 Desember 2020, Bukti T-5. Berkenaan dengan rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya dimaksud, Termohon telah menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 1393 dan seterusnya tentang Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 sebagai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya, tanggal 10 Desember 2020 untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 46 Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang pada tanggal 13 Desember 2020.

443. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hanya 1 TPS, ya. itu, ya?

444. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

1 TPS, Yang Mulia.

445. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

446. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Dan sudah dilaksanakan oleh Termohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

447. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus!

448. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Berikutnya, Yang Mulia. Huruf C. Bahwa tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kota telah dilaksanakan Termohon mulai tanggal 15 sampai tanggal 17 Desember 2020 yang dihadiri oleh Bawaslu ... PPK se-Kota Surabaya, seluruh saksi pasangan calon, dan Bawaslu Kota Surabaya, dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani formulir ... Formulir Model D Hasil Kabupaten/Kota.

449. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini rekapitulasi di tingkat kota, ya?

450. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Kota, saksi Pemohon sudah menandatangani (...)

451. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah tanda tangan.

452. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Yang bernama Rusli Effendi, Yang Mulia (...)

453. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

454. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Sebagai saksi mandat.

455. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

456. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Selanjutnya halaman 32, Yang Mulia.

457. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, 32 enggak ada?

458. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Ya, 20.

459. KETUA: ARIEF HIDAYAT

23 atau 32? Apa yang akan disampaikan itu?

460. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Bahwa ... ini sebagai akhir saja, Yang Mulia.

461. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

462. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Bahwa perwujudan kedaulatan rakyat telah dilaksanakan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai kehendak politik masyarakat untuk menjatuhkan pilihan. Landscape proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS telah terpotret dengan baik, masyarakat pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dan jika ada dapat dipastikan Bawaslu Kota Surabaya memiliki kewenangan untuk itu akan bertindak sesuai dengan kewenangan kontribusi yang dimilikinya.

463. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

464. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Yang terakhir, Yang Mulia. Bahwa terbukti Termohon telah melaksanakan pilihan yang ... pemilihan yang bebas atau free election dapat dilihat dalam 2 indikator. Yang pertama, kehendak masyarakat pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat secara bebas dalam mengekspresikan kehendaknya dalam menggunakan hak pilih di seluruh TPS Kota Surabaya yang telah disediakan oleh Termohon dengan menerapkan secara ketat protokoler kesehatan. Surat suara menjadi mekanisme utama guna menghindari intimidasi saat pemilih menggunakan hak pilihnya, maka kerahasiaan dalam memberikan suara telah diterapkan sedemikian rupa dalam TPS agar seluruh pemilih merasa aman dan nyaman dalam memberikan suaranya.

Halaman 30 ... halaman yang berikutnya, Yang Mulia. Angka 14. Bahwa Pemohon tidak sedikitpun membantah perolehan suara masing-masing pasangan calon yang telah ditandatangani oleh saksi Pemohon, maka berkenaan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang tertuang dalam Formulir D Hasil Kabupaten/Kota KWK dan telah dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor 1419 dan

seterusnya Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul 12.47 WIB dinyatakan sah dan tetap berlaku.

Petitung, yang Mulia.

465. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang Petitung.

466. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Berikutnya, menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 1419 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul 12.47 WIB.

Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

Pasangan Calon Nomor Urut 1 perolehan suaranya=597.540.

Pasangan Calon Nomor Urut 2=451.794

Total suara ... suara ... total suara sah sejumlah=1.049.334 suara.

Demikian, Yang Mulia. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

Terima kasih.

467. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Prof. Saldi, ada?

468. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. KPU, ya. Ini ada beberapa dalil yang penting sebetulnya, tapi tadi tidak dijelaskan.

Pertama. Anda kan membantah soal TSM, ya. Tetapi, ini ada poin-poin di Permohonan Pemohon itu tabel II itu soal pelanggaran TSM Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 poin 1, 2, 3, dan 4. Itu gimana penjelasan Saudara penjelasannya? Di jawaban Termohon.

469. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Terima kasih, Yang Mulia. Yang terkait dengan TSM, kita sudah sampaikan di halaman 20 ... 22, Yang Mulia.

470. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar!

471. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

TSM dan itu kewenangan absolut Bawaslu Kota Surabaya, sehingga Termohon tidak menyampaikan secara ... apa namanya ... detail terkait dengan pelanggaran TSM.

472. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, Saudara tidak memberikan ... apa, ya ... jawaban soal itu. Tapi, kan yang menyelenggarakan semuanya kan itu Saudara, kan?

473. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Ya, tapi terkait dengan teknis penyelenggaraannya, Yang Mulia.

474. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

475. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Karena ini terkait dengan pelanggaran TSM, maka itu kewenangannya Bawaslu.

476. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan, begini, jadi kalau ada dalil Pemohon, itu mestinya yang terkait dengan Saudara itu, itu dijelaskan semua. Karena kan yang berada, kan Pemohon dengan Termohon. Yang lain-lain itu sifatnya membantu memberikan keterangan saja. Kalau Anda tidak jelaskan dengan baik, ada enggak yang bisa dijelaskan secara lisan terkait dengan ini?

477. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Terkait dengan pelanggaran TSM, memang Termohon tidak mengetahui soal itu, Yang Mulia. Tapi sudah dijelaskan di halaman 23 ... eh, 22 sampai dengan 23, Yang Mulia. 22 sampai 23.

478. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Di sini ada juga, misalnya desain pembagian peran birokrasi untuk mendukung Pasangan Calon 01. Apa yang bisa Saudara jelaskan dengan ini?

479. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Kalau yang itu kewenangan Bawaslu, Yang Mulia, Termohon tidak ... apa ... memberikan ... apa namanya ... tanggapan terkait dengan itu. Kalau nanti Termohon misalkan menjawab nanti tidak sesuai dengan fakta, ini malah Termohon yang nanti (...)

480. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, Anda menganggap ini menjadi kewenangan apa?

481. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Kewenangan Bawaslu, Yang Mulia.

482. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bawalu, ya?

483. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Ya.

484. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Karena terkait dengan pengawasan?

485. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Betul, Yang Mulia.

486. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, tidak terkait dengan KPU sebagai penyelenggara?

487. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Kenapa, Yang Mulia?

488. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tidak terkait dengan KPU?

489. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Tidak terkait karena KPU teknis penyelenggaranya, Yang Mulia. Sebagaimana arahan dari Pak ... Yang Mulia Pak Arief kemarin, mana yang menjadi kewenangan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu sebagai pemberi keterangan. Begitu, Yang Mulia.

490. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saudara mengetahui enggak ada ini, surat Bu Risma ini?

491. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUJIATMIKO

Tidak tahu, Yang Mulia.

492. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau orang tidak tahu jadi sulit juga menanyanya ini. Atau yang ini, leaflet ini? Coba, Anda dari KPU menjawabnya, jangan diserahkan ke Kuasa Hukum saja. Tolong dikasih mik!

493. TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS TURCHAM

Leaflet sebagaimana yang disampaikan (...)

494. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Surat Bu Risma ini, Anda tahu?

495. TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS TURCHAM

Terkait dengan surat Bu Risma, kami tidak mengetahui karena itu bukan bagian dari bahan kampanye, Yang Mulia.

496. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan bagian dari alat kampanye?

497. TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS TURCHAM

Bukan alat kampanye, tapi bahan kampanye, Ketua.

498. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini apa namanya?

499. TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS TURCHAM

Ya, kalau saya melihatnya itu surat, begitu saja.

500. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Surat. Tapi bukan (...)

501. TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS TURCHAM

Bukan merupakan bagian dari bahan kampanye sesuai dengan ketentuan yang telah kami pahami selama ini, begitu.

502. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi bahwa ini ada, Anda tahu, enggak?

503. TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS TURCHAM

Pernah tahu sebenarnya.

504. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, ini sudah mulai bergeser Saudara ini. Ini Anda pernah tahu ada, ya?

505. TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS TURCHAM

Pernah tahu dari link berita, Yang Mulia.

506. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Soal leaflet ini?

507. TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS TURCHAM

Leaflet itu merupakan ... kami pernah mengetahui leaflet tersebut saat melakukan pembahasan terkait dengan materi dan desain dari alat peraga kampanye dan bahan kampanye.

508. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

509. TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS TURCHAM

Namun, mohon izin menambahkan.

510. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

511. TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS TURCHAM

Sampai dengan saat ini, kami masih belum melakukan pencetakan terhadap itu karena ada surat dari Paslon 1 sendiri yang tidak ingin dicetak sebelum permasalahan selesai.

512. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Masalah apa itu?

513. TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS TURCHAM

Desain.

514. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Masalah desain.

515. TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS TURCHAM

Karena Pihak Pemohon juga menyampaikan proses hukum lainnya di tingkat yang di atasnya kita, begitu.

516. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Ini ada tabel 4, peta kecurangan. Di Permohonan Pemohon itu halaman 15 sampai halaman 23 ... 24. Di mana itu Anda jawab, Pemohon ... Termohon?

517. TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS TURCHAM

Terkait dengan peta kecurangan, sesuai dengan ketentuan yang kami pahami merupakan kewenangan dari teman-teman penyelenggara di tingkat pengawasan untuk bisa memahami persoalan itu, Pimpinan.

518. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, jadi ini Bawaslu lagi?

519. TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS TURCHAM

Kira-kira seperti itu.

520. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nanti Anda saya suruh jadi Bawaslu saja kalau begitu ini. Karena prinsipnya begini lho, ini dalil mereka itu kan dihadapkan ke Anda

sebetulnya. Tugas Bawaslu nanti dia akan membantu yang ... begitu penjelasan Prof. Arief Hidayat kalau saya tidak salah, yang terkait dengan kewenangan Bawaslu, nanti akan jelaskan oleh Bawaslu. Yang ada kaitannya dengan Pihak Terkait, akan dijelaskan oleh Pihak Terkait. Tapi inti pokoknya itu, sebetulnya Permohonan ini dihadapkan ke Termohon, itu sebetulnya. Jadi, Anda tidak bisa berdalil bahwa ini tidak kewenangan kami, enggak. Pemohon tugas Termohon menjelaskannya, gitu. Nanti kalau berkaitan dengan Bawaslu, akan dijelaskan oleh Bawaslu yang bersentuhan dengan kewenangan Bawaslu. Terkait dengan Pihak Terkait, akan dijelaskan oleh Pihak Terkait, makanya saya tanyakan ini. Karena menurut kami, ini menjadi bagian penting yang harus dieksplorasi oleh Termohon. Nanti sifatnya Bawaslu menerangkan, sifatnya Pihak Terkait menerangkan juga.

Terima kasih, Pak Ketua.

521. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Yang Mulia Pak Manahan, ada? Cukup? Baik.

Sekarang kita giliran ke Tim Advokasi Pasangan Calon Pihak Terkait ini. Silakan, Pihak Terkait! Ini Pihak Terkait merespons banyak sekali. Silakan, pokok-pokoknya saja yang disampaikan, ya!

522. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: TOMUAN SUGIANTO HUTAGAOL

Izin, Yang Mulia, seperti yang tadi kami sampaikan, akan disampaikan oleh rekan kami secara daring.

523. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

524. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: TOMUAN SUGIANTO HUTAGAOL

Arif Budi Santoso.

525. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dari mana dia?

526. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: TOMUAN SUGIANTO HUTAGAOL

Dari Surabaya, Yang Mulia.

527. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, langsung dari Surabaya, ya.
Mana, tolong!

528. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

529. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumssalam wr. wb.

530. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Ya, mohon maaf, Yang Mulia, kami tidak bisa menghadiri secara langsung karena sedang menjalani isolasi mandiri.

Jadi, kami sampaikan keterangan dari Pihak Terkait terkait Eksepsi.

Yang pertama. Bahwa men ... tidak menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi karena (...)

531. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan.

532. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Karena tidak menyangkut perolehan suara.

533. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan.

534. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Bahwa terkait pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 8/PUU-XIV/2016 ... mohon maaf, terkait tadi yang soal bahwa presentase ... bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah pernah ditegaskan bahwa terkait

pelanggaran administrasi adalah kewenangan KPU, sengketa antarpeserta pemilihan adalah Bawaslu, dan seterusnya.

Dan kemudian, terkait pelanggaran administrasi TSM juga adalah menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan juga sudah pernah disampaikan perkaranya di Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Dan sudah diputus, sebagaimana Putusan Nomor 01/Reg dan seterusnya, tanggal 3 Januari 2021.

535. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sambil anu, ya (...)

536. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Bukti PT-37 yang menyatakan bahwa Terlapor, dalam hal ini (...)

537. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tolong, tolong berhenti!

538. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Pasangan Nomor 1 tidak terbukti secara meyakinkan (...)

539. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jangan ... jangan ngomong sendiri!

540. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Dan seterusnya.

541. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hei, jangan ngomong sendiri. Anda juga harus mendengarkan kalau ada Hakim yang mau menyela atau bagaimana, Anda harus dengar ya!

542. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Inggih, siap, siap, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia.

543. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi Saudara sudah menyampaikan bahwa kewenangan, itu bukan kewenangan karena masalah TSM, bukan perselisihan?

544. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Ya.

545. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sekarang yang kedua, mengenai apa?

546. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Kedua. Bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing.

547. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa tidak punya Legal Standing?

548. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Karena perolehan suara kalau sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) dan Lampiran 5 huruf b angka 4 PMK Nomor 6 Tahun 2020, maka 0,5% jauh. Karena dari perolehan suara=1.049.334 suara dikalikan 0,5% ketemu adalah=5.246.

549. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

550. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Sementara, selisih perolehan suara antara Pasangan Nomor 1 dan Pasangan Nomor 2 adalah=145.746 suara atau 13,88%.

551. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

552. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Sehingga hampir 30 kali lipat, jauh di atas syarat minimal, 5.246.

553. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, itu sudah sampai (...)

554. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Kemudian, saya terangkan beberapa pertimbangan-pertimbangan putusan Mahkamah (...)

555. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, sebentar!

556. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Sebelumnya (...)

557. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar! Itu dianggap sudah dibacakan.

558. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Inggih, sudah dianggap dibacakan, Yang Mulia.

559. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sampai halaman 21.

560. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Sedikit tentang penundaan pemberlakuan karena ada permintaan untuk menunda pemberlakuan. Itu juga kami tanggap dengan mengatakan bahwa dengan berdasarkan (...)

561. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu sudah sampai halaman 21 dianggap dibacakan.

562. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Oh, dianggap dibacakan.

563. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang, Eksepsi yang berikutnya, apa? Halaman 22 itu.

564. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Terus kemudian, Permohonan tidak jelas.

565. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa tidak jelas?

566. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Karena semestinya diakui sendiri bahwa ini adalah ... oleh Pemohon bahwa ini adalah perselisihan hasil pemilu, tetapi dalam paparannya sama sekali tidak menjelaskan soal perselisihan hasil pemilu, tapi hanya soal kecurangan-kecurangan TSM.

567. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang di Pokok Permohonan.

568. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Oke, di Pokok Permohonan. Yang pertama, kami sampaikan bahwa pemilu telah berjalan dengan jujur dan adil dalam suasana aman dan demokratis sejak pengungutan suara sampai dengan penghitungan di seluruh tingkatan.

569. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

570. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Dan seluruh saksi-saksi dari kedua belah pasangan calon, baik di tingkat TPS, kemudian di tingkat kecamatan, sampai kelurahan, semuanya menandatangani Form Model D Hasil KWK, sebagaimana Bukti PT-5 sampai dengan Bukti PT-36.

571. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

572. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Kemudian, Pemohon juga tidak menerangkan sebenarnya pelanggaran TSM yang seperti apa? Kemudian, itu juga kami sempat menguraikan juga contoh-contoh pelanggaran yang tidak sama antara di 6 kabupaten di Papua dengan jenis pelanggaran yang ada di Pilkada Surabaya.

Mungkin saya agak langsung lanjut ke dalil-dalil yang dituduhkan oleh Pemohon.

573. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

574. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Lanjut ke sekitar halaman 32, Yang Mulia.

575. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, 32 dan seterusnya itu.

576. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Inggih. 33 ... 33, Yang Mulia.

577. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

578. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

33. Bahwa Pemohon (...)

579. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mulai poin 20 (...)

580. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Dalam pandangan kami telah gagal memahami posisi Bu Tri Rismaharini sebagai anggota dan pengurus partai politik yang berkampanye (...)

581. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kok putus ini? Itu makanya, Kuasa Pemohon, Pihak Terkait, kalau penjelasan yang lama-lama ... agak lama begini, mestinya dari ... anu ... yang secara luring yang hadir, ya. Nanti di dalam pemeriksaan saksi atau ahli, kita hanya ke saksi atau ahli cepat itu kita bisa daring. Tapi yang ini, kan harus itu.

Ya, kembali ke tadi Kuasa Hukum Pihak Terkait dalam perkara di Surabaya. Tolong kembali dijelaskan lagi! Petugas, dikembalikan ke sana bisa, enggak? Pak siapa tadi? Namanya Pak siapa?

582. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: TOMUAN SUGIANTO HUTAGAOL

Pak Arif Budi Santoso, Yang Mulia.

583. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Arif Budi Santoso kembali, ke sana! Anda bisa meneruskan, enggak, di sini? Coba, Tim Teknisnya! Bagaimana? Ada masalah apa? Ha? Oh, dari sana putus? Oke, ya. Ya, ini sinyal dari ... makanya itu ada gangguan sinyal, ya. Kalau yang dari MK enggak mungkin, MK teknologinya yang dipakai canggih ini. Jadi, secara internasional baru ... yang canggihnya yang dipakai MK, enggak ada peradilan seperti ini di lain tempat. Ya, Prof. Saldi, ya. Betul, kan? Ya, itu. Kita sudah mempraktikkan yang kayak begini sudah beberapa kali atau beberapa tahun yang lalu melalui vicon yang sekarang sudah di-backup dengan melalui ini internet, ya, tersebar di seluruh Indonesia, ya.

Bagaimana ini, Pihak Terkait? Ini baru sampai halaman 34 yang menjelaskan membantah dalil mengenai peran serta Ibu Wali Kota Bu Risma ... Tri Rismaharini, ya. Meskipun terus kemudian ada ... apa ... tabel-tabel yang disampaikan, tapi bisa enggak diteruskan di sini?

584. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: TOMUAN SUGIANTO HUTAGAOL

Siap, Yang Mulia. Kami izin untuk coba bantu, Yang Mulia.

585. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, pokok-pokoknya, bagaimana? Sekaligus tadi mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Prof. Saldi itu, Pihak Terkait bisa mengklarifikasikan enggak, ya, yang tadi?

586. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: TOMUAN SUGIANTO HUTAGAOL

Mengenai surat Bu Risma tadi, Yang Mulia.

587. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ini kan berkenaan dengan surat tadi, adanya surat Bu Risma. Kemudian, video Bu Risma dan ketiga ini ditanggapi di halaman 34 dan seterusnya ini. Bagaimana, bisa menjelaskan enggak? Kalau dibaca juga enggak selesai ini. Atau intinya (...)

588. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: TOMUAN SUGIANTO HUTAGAOL

Ya, Yang Mulia. Bahwa (...)

589. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bagaimana? Intinya bagaimana?

590. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: TOMUAN SUGIANTO HUTAGAOL

Bahwa bukan cuma Pihak Paslon Nomor 1 saja yang ... apa ... melihat sosok Bu Risma, tapi dalam dalil kami juga disebutkan bahwa Paslon Nomor Nomor 2 juga pernah mempopulerkan jargon atau slogan "Biyen Risma saiki MA". Padahal, Bu Risma sendiri adalah merupakan kader dari partai pengusung Paslon Nomor Urut 1.

591. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus?

592. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: TOMUAN SUGIANTO HUTAGAOL

Dalil mengenai keterlibatan Bu Risma ... Bu Tri Rismaharini dalam jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya. Bahwa perlu kami sampaikan bahwa selain ... Bu Tri Rismaharini, selain di luar jabatannya sebagai wali kota, juga merupakan pengurus struktural DPP PDIP Perjuangan ... PDI Perjuangan.

593. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang vide Bukti PT-42 itu, ya?

594. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: TOMUAN SUGIANTO HUTAGAOL

Ya, sebagai yang merupakan partai pengusung dari Paslon Nomor Urut 1.

595. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan Bu Risma juga termasuk juru kampanye resmi?

596. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: TOMUAN SUGIANTO HUTAGAOL

Siap, Yang Mulia.

597. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus?

598. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: TOMUAN SUGIANTO HUTAGAOL

Mengenai surat Bu Risma, perlu kami sampaikan juga, Yang Mulia. Bahwa sudah pernah diajukan di Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan telah diputus oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang menolak Permohonan dari Pemohon.

599. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

600. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: TOMUAN SUGIANTO HUTAGAOL

Menolak laporan, maksud kami, Yang Mulia. Dari laporan (...)

601. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang (...)

602. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: TOMUAN SUGIANTO HUTAGAOL

Dari KIPP.

603. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Yang Bukti PT-44 itu, apa itu?

604. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pihak Terkait ... halo ... halo.

605. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: TOMUAN SUGIANTO HUTAGAOL

Siap, Yang Mulia.

606. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau seorang pejabat kayak Ibu Risma, ya, dia pengurus partai, kemudian dia juga wali kota, itu kan, kalau mau kampanye, kan harus cuti, ya?

607. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: TOMUAN SUGIANTO HUTAGAOL

Siap, Yang Mulia.

608. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu selama kampanye pemilihan ko ... bupati ... apa ... Wali Kota Surabaya, itu berapa kali Bu Risma cuti? KPU, apa yang bisa dijelaskan soal cuti Bu Risma ini, KPU? Kalau pejabat mau ... mau cuti, melaksanakan kampanye itu, apa yang diketahui? Apa yang sampai ke Anda?

Pakai mik, pakai mik!

609. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pakai mik, pakai mik!

610. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pakai mik. Mana, miknya?

611. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUDJIATMIKO

Menyampaikan pemberita ... apa namanya ... cuti, Yang Mulia.

612. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Enggak ... tunggu! Saya tanya ke KPU. Nanti Anda tanya lagi ke belakang. Pusing saya nanti. Silakan!

613. TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS TURCHAM

Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan kewajiban pemerintah atau pejabat negara (...)

614. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

615. TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS TURCHAM

Dalam melakukan kampanye harus member ... harus meminta cuti atau mengurus perizinan.

616. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

617. TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS TURCHAM

Salah satu yang diterima oleh KPU adalah KPU hanya menerima tembusan atas jawaban persetujuan cuti atau izin yang disampaikan.

618. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Berapa kali selama ... apa?

619. TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS TURCHAM

Kami menerima tembusan itu se ... dua kali kalau tak salah, begitu.

620. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dua kali, ya?

621. TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS TURCHAM

Betul.

622. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Berarti dua kali kampanye?

623. TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS TURCHAM

Dua kali yang sampai ... surat itu sampai ke kita, begitu.

624. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu ada Anda lampirkan, ndak, sebagai bukti?

625. TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS TURCHAM

Tidak ... tidak.

626. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah karena itu tadi asumsi Anda keliru. Padahal ini, kan harusnya menjelaskan bahwa ketika ini, ketika ini, itu pada masa cuti Bu Risma. Ini buktinya di kita. Nah, itu, kan jadi kuat yang kayak-kayak begitu. Nah, jadi ... apa namanya ... dua kali, ya, sepengetahuan Anda, ya?

627. TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS TURCHAM

Dua kali kami mendapatkan tembusan surat begitu, Yang Mulia.

628. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ada surat izin itu, ya, untuk cuti karena untuk kampanye, ya?

629. TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS TURCHAM

Betul.

630. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi sayang itu tidak ada dibawa, ya?

631. TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS TURCHAM

Ya, Yang Mulia.

632. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Terima kasih, Pak Ketua.

633. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Saya mau lanjutkan, ya. Ini ada putusan KPU ... Surat Ketua KPU Pusat Nomor 866. Ini disampaikan oleh Pihak Terkait. Bahwa foto pejabat negara atau pejabat daerah dapat dicantumkan pada desain bahan kampanye atau pejabat daerah dapat dicantumkan pada desain

bahan kampanye dan alat peraga kampanye sepanjang pejabat negara atau pejabat daerah tersebut adalah pengurus partai politik yang mengusulkan pasangan calon. Itu dipakai, betul? Anda tahu itu?

634. TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS TURCHAM

Itu surat jawaban dari KPU RI terkait dengan Permohonan konsultasi yang kami sampaikan terhadap pengajuan materi dan desain yang disampaikan oleh Pasangan Calon Nomor 1 dalam memuat foto Bu Risma T. Harini pada saat itu, Yang Mulia.

635. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

636. TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS TURCHAM

Dan kami mendapatkan jawaban seperti itu sebagai bentuk legal ... landed ... Legal Standing bagi kami untuk bisa mencetak nanti ke depannya, begitu.

637. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Itu, kan bukan bukti dari Saudara? Tadi bukti dari Pemohon malah? Itu Pihak Terkait? Coba ... coba lihat. Pencantuman foto tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dan telah diadopsi oleh Bawaslu Kota Surabaya. Begitu, ya?

638. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: TOMUAN SUGIANTO HUTAGAOL

Permisi, Yang Mulia.

639. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, gimana?

640. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: TOMUAN SUGIANTO HUTAGAOL

Pihak Terkait ... Kuasa Hukum Pihak Terkait sudah tersambung, Yang Mulia.

641. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ya, dilanjutkan!

642. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Inggih. Mohon maaf, Yang Mulia. Mohon maaf, kami tadi listriknya mati, Yang Mulia. Mohon maaf sekali.

643. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar ... sebentar! Jangan dilanjutkan dulu. Kita melanjutkan ini dulu.

644. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Inggih. Siap, Yang Mulia.

645. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, memang KPU ... menurut KPU memang ada surat ini, ya, dari KPU Pusat, ya? Boleh, ya? Ya, boleh, betul?

646. TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS TURCHAM

Boleh. Betul, Yang Mulia.

647. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

648. TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS TURCHAM

Ada surat tersebut.

649. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Baik, kalau begitu silakan diteruskan.

650. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Mohon maaf, tadi ada yang saya juga ketinggalan ... apa ... beberapa poin. Tapi tadi sepintas saya menja ... mendengarkan soal pertanyaan dari Yang Mulia tadi soal cuti. Jadi, Ibu Tri Rismaharini sudah mengajukan izin cuti kepada gubernur dan oleh Gubernur yang diizinkan itu yang diberikan izin adalah yang hari kerja. Karena mengacu pada surat edaran Mendagri kalau hari libur Sabtu/Minggu, maka tidak perlu ada izin cuti, jadi otomatis diperbolehkan berkampanye.

Jadi, kalau Bu Risma adalah satu kali per minggu itu sama plus yang ... satu ... satu hari kerja per satu minggu sama beberapa hari yang di ... apa namanya ... Sabtu/Minggu yang memang tidak memerlukan izin cuti sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor 273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

651. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Terus, singkat saja yang lain! Karena waktunya sudah banyak hilang ini.

652. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Ya, Yang Mulia.

653. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, tambahkan. Apa lagi yang akan disampaikan yang penting-penting? Yang lain ... yang tidak dibacakan atau tidak disampaikan dianggap telah dibacakan.

654. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Bahwa seluruh pelanggaran yang disebutkan oleh Pemohon sebagian besar sudah dilaporkan ke Bawaslu dan sudah diputuskan tidak terbukti pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dan kemudian, beberapa tidak dilaporkan, sehingga kami juga baru mengetahui setelah ada Permohonan ini. Nanti kami jawab semuanya satu per satu, tidak ada yang kami lewatkan di dalam keterangan Pihak Terkait ini.

Jadi, kemudian soal Program Jumantik RT/RW. Kami tegaskan bahwa RT itu adalah lembaga yang mandiri, mereka dipilih secara demokratis oleh masyarakat. Sehingga walaupun mereka dapat honor

dari pemerintah kota, tidak benar dalil Pemohon bahwa dengan serta-merta mereka akan memilih Bu Risma.

Bahkan, dalam bukti itu adalah dukungan-dukungan terbuka dari RT-RT kepada Paslon Nomor 2, bahkan mereka sering dikumpulkan dalam ballroom-ballroom hotel. Perlu kami sampaikan juga di dalam keterangan Pihak Terkait ini bahwa Pemohon itu adalah sudah sejak Januari 2020 sudah declair sebagai calon wali kota, mereka sudah bergerak menggunakan perangkat RT dan RW. Paslon kita hanya (suara terputus) hari sebelum pendaftaran, baru menjadi calon, ada di Bukti PT-52 sampai dengan PT-67, Yang Mulia.

655. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus, dalil yang lain?

656. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Kemudian, terkait lampu LED yang dikatakan ada penyalahgunaan. Bahwa tidak ada satu pun pemberian itu yang tidak didasarkan usulan. Jadi, semua sudah atas dasar usulan dari pengurus RT/RW dan kemudian sudah di ... ada memang yang cepat diloloskan, ada yang mungkin memang agak lambat.

Kemudian, soal tuduhan yang di bansos. Kami tegaskan bahwa tidak benar, tuduhan ini tidak berdasar. Disebutkan di situ bahwa Paslon Nomor 1 menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program PKH dari Kementerian Sosial bertempat di rumah dinas wali kota. Paslon kami, baik Calon Wali Kota, Pak Eri Cahyadi maupun Pak Armudji, tidak pernah mengikuti acara tersebut. Kami cek Bukti PT-15 dan PT-16 tidak nyambung dengan dalilnya, tidak ada misalnya foto paslon kami ada di acara itu, enggak ada. Bukti yang dilampirkan itu, bukti yang lain ... kegiatan yang lain, berbeda.

Kemudian, soal surat Bu Risma tadi sempat juga tadi ditanyakan. Jadi, surat Bu Risma itu sudah di ... bahkan 2 kali diputus oleh lembaga yang berbeda. Kemudian, dilaporkan lagi ke Bawaslu Provinsi juga masih ditangani lagi. Jadi, itu kami hadapi 2 kali dan dua-duanya pada akhirnya diputuskan tidak bersalah.

Soal pamflet. Kami sampaikan bahwa KPU ini tidak pernah mencetak bahan kampanye dan alat peraga kampanye. Itu penyebabnya karena Paslon Nomor 2 tidak bersedia menyerahkan materi dan desain bahan kampanye sama sekali karena mereka kecewa tuntutan untuk gambar Bu Risma dicoret dari APK dan BK itu ditolak oleh surat KPU Pusat itu. Jadi, mereka malah menggugat kemudian ke Pengadilan Negeri Surabaya yang justru di Pengadilan Negeri Surabaya itu mereka tidak pernah hadir 3 kali, sehingga akhirnya dinyatakan gugur.

Nah, surat dari pengadilan itulah dipakai sebagai dasar supaya mereka tidak menyalahgunakan materi dan bisa menjadi bahan kampanye. Sehingga materi dan desain bahan kampanye dari Paslon Nomor 2 itu mereka bikin sendiri semua. Itu kemudian menyebabkan tidak ada satu pun bahan kampanye yang standar karena tidak ada yang ... specimen yang dicetak oleh KPU Surabaya. Nah, soal pamflet itu sehingga ada banyak pihak yang memang mencetak, kami tidak mencetak pamflet itu.

Kemudian, soal program Rp 150.000.000,00 ... eh, Rp 175.000.000,00 itu memang disampaikan dan sudah diproses di Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan sudah diputus tidak ... tidak ada persoalan dengan soal itu. Bahkan, yang lebih masif justru Paslon Nomor 2 yang ... apa namanya ... yang sejak awal memprogramkan Rp150.000.000,00. Kami sudah sandingkan itu, program-program dari Paslon Nomor 2 yang disampaikan di visi-misi sama yang di program mereka, jauh sekali berbeda.

Kemudian, soal bahwa pemberian makanan itu juga sudah ditangani oleh Bawaslu. Dan kami tegaskan bahwa permakanan itu sudah langsung diserahkan oleh warga masyarakat pelaksanaannya. Jadi bukan lagi pemerintah kota, pemerintah kota itu hanya memberikan dananya, diserahkan langsung ke masing-masing RT/RW supaya makanannya itu bisa langsung sampai kepada masyarakat. Nah, sehingga tidak bisa dikontrol, siapa yang akan nanti menyerahkan makanan itu? Pemerintah itu hanya sampai pada pemberian uang kepada yang tukang masakannya.

Kemudian (...)

657. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu (...)

658. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Kalau mobilisasi aparat sipil negara. Kami tegaskan bahwa tidak benar ada mobilisasi. Kalaupun ada 1-2, itu di luar koordinasi, di luar perintah, di luar keterlibatan dari ... apa Namanya ... Paslon Nomor 1. Bahkan, dari bukti-bukti yang kami sampaikan yang kerap kali melibatkan ASN Kota Surabaya justru Paslon Nomor 2 sendiri. Mulai Bukti-74 itu mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, Dwi Purnomo itu terlibat bersama Pak Mujiaman, ada fotonya. Kemudian, ada nismah ... malah ada videonya ,yaitu Pak Machfud Arifin bikin video campaign dengan outsourcing dari DKRTH. Terus 76, 77, 78, 79, itu membuktikan adanya keterlibatan ASN bersama Paslon Nomor 2.

Kemudian soal (...)

659. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, di ... yang berikutnya ini saja, yang lain dianggap dibacakan. Mengenai peta pelanggaran serta kemenangan pasangan calon, itu gimana itu pet ... ada peta pelanggaran itu tadi?

660. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Ya. Jadi peta itu, kan didasarkan soal yang disebut surat Bu Risma tadi disebar ... disebar itu berdasarkan surat Bu Risma. Nah, itu kami bantah juga, salah satunya (suara terputus) tabel-tabel di halaman (...)

661. KETUA: ARIEF HIDAYAT

67 dan seterusnya itu.

662. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

67. Bahwa tidak ada keterkaitan antara pelanggaran tersebut dengan perolehan suara. Karena kalau memang ada kecurangan di ... terkait dengan perolehan suara mestinya kan spesifik di tingkat TPS atau setidaknya di tingkat PPK. Dan terbukti dari tabel-tabel itu di 20 kecamatan itu banyak juga Paslon Nomor 2 yang menang. Mereka menang di 990 TPS, sebagaimana tabel di halaman 67 sampai 80 (...)

663. KETUA: ARIEF HIDAYAT

4, ya?

664. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Ya. 84, Yang Mulia.

665. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

666. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Itu kami rinci sedikit di halaman 85. Total per kelurahannya malah ketat sekali head to head. 9.890, 9.320 di (ucapan tidak terdengar jelas). Di Ngagel 2.146, 2.205. Jadi, malah menang Paslon 2 di Ngagel ... Kelurahan Ngagel itu. Kemudian, Sawunggalih menang tipis paslon kita, sehingga ... dan di (ucapan tidak terdengar jelas) selisih 300.

667. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus, apa yang penting yang lain?

668. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Tidak benar. Kemudian terakhir soal kecurangan, justru kecurangan itu banyak terjadi dan dilakukan oleh Paslon Nomor 2 dan jenis kecurangannya malah justru bisa dikategorikan sebagai pelanggaran money politics yang TSM, mulai sekitar 30.000 paket bantuan BNPB yang masih ada gambarnya logo BNPB dibagikan. Kami sertakan juga hampir mungkin 8 foto mereka membagikan itu dengan ada logo BNPB, sudah kami laporkan ke Bawaslu

669. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Itu anu, ya. Sebentar ... sebentar, Kuasa Hukum. Sebentar!

670. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Sudah ada laporan juga ke polrestabes, sekarang sedang dalam tahap penyelidikan. Kemudian, ada serangan-serangan fajar.

671. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu Bukti PT-87 dan seterusnya itu?

672. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Ada yang tertangkap tangan, itu sampai lanjut ke penyidikan, dan ditangani ke kepolisian (...)

673. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kacau ini!

674. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Di Bukti PT-100 dan PT-100.A. Yang lain ini memang sudah kita laporkan, sudah ada kita pendampingan, tetapi memang kebanyakan tidak bisa berlanjut. Karena memang ada satu yang agak terlambat laporannya. Kemudian saksi-saksi rata-rata takut, Yang Mulia, untuk menyampaikan keterangan yang utuh karena mereka berdalih, "Paslon Nomor 1 kan sudah menang, saya ndak berani."

Kemudian, informasi juga tidak lengkap tentang siapa pelakunya. Jadi, kita hanya bisa menyampaikan pembagiannya.

675. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu Bukti yang PT-87 itu ... PT-87 itu dan seterusnya, ya? Sampai Bukti PT-100?

676. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Ya, PT-87 dan seterusnya.

677. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya? Betul, ya? Bukti-buktinya itu, ya?

678. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Betul, Yang Mulia.

679. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Bukti PT-87 sampai dengan PT-100 itu, betul?

680. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Ya, ya. Betul, Yang Mulia.

681. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

682. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Bukti-bukti pelanggaran sudah kita laporkan juga, selain juga banyak ... masih banyak juga sebenarnya pelanggaran-pelanggaran yang lain, cuma ini kita berikan contoh yang money politics saja. Nanti mungkin kalau ada yang kurang (...)

683. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sekarang Petitemnya! Di sini saja yang baca Petitem.

684. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

685. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

686. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Petitem. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa Permohonan Pemohon.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing.

Kami kelupaan satu, Yang Mulia. Bahwa Pemohon ... Permohonan Pemohon kabur atau obscur libel. Saya tambahkan (...)

687. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tadi di Eksepsi sudah dianggap dibacakan itu.

688. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Atau setidaknya-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

689. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

690. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Kemudian, dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 1419 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan seterusnya, tanggal 17 Desember 2020.
3. Menetapkan perolehan suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.
 - 1) Pasangan Nomor 1=597.540 atau 56,94%.
 - 2) Paslon Nomor 2=451.794 atau 43,06%.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

691. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

692. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: ARIF BUDI SANTOSO

Mohon maaf sebelumnya, tadi ada gangguan.

693. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sekarang Bawaslu Kota Surabaya, silakan!

694. BAWASLU: AGIL AKBAR (KOTA SURABAYA)

Baik, Yang Mulia.

695. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pokok-pokoknya saja, ya.!

696. BAWASLU: AGIL AKBAR (KOTA SURABAYA)

Izinkan kami menyampaikan beberapa pokok-pokok keterangan tertulis kami.

697. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

698. BAWASLU: AGIL AKBAR (KOTA SURABAYA)

Yang pertama, terkait surat Risma untuk warga Surabaya pada A.1. Lalu, pada A.2 video surat Risma. Lalu, pada A.3.B tentang Tri Rismaharini membuat dan menyebarkan pamflet. Lalu, pada A.3.C tentang Tri Rismaharini melakukan kampanye terselubung dan seterusnya. Pada D.5 dan E tentang menjanjikan sejumlah uang atau pun program dan seterusnya. Pada G tentang mengklaim program Pemerintah Kota Surabaya untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Yang pertama, Yang Mulia. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah meregister Nomor Laporan 01 dan seterusnya, dengan amar putusan, "Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara terstruktur, sistematis, dan massif." Pada Bukti PK-1, halaman 2.

Lalu, yang kedua. Bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah menangani dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain dengan dugaan tindak pidana pemilihan yang telah kami sampaikan pada Bukti PK-3, halaman 3 dan PK-4, halaman 4.

Kami jelaskan di situ bahwa surat tersebut tidak mencantumkan jabatan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya. Lalu, yang kedua. Surat tersebut memiliki barcode yang kemudian apabila discan, itu tertembus pada PDI Jawa Timur.

Yang ketiga. Surat tersebut diterbitkan pada tanggal 22 November yang merupakan hari Minggu atau hari libur. Pada ketentuannya, hari libur tidak memerlukan izin cuti kampanye, Yang Mulia.

Berikutnya, untuk penjelasan terkait dalil Pemohon A.3A. Tri Rismaharini memanfaatkan pertemuan dengan kapasitas sebagai wali kota untuk mengkampanye dan mengajak pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Kami terangkan. Berdasarkan pengawasan kami pada tahapan kampanye, Tri Rismaharini telah melakukan kampanye sebanyak 21 kali. Dari 21 kali tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan, pada Bukti PK-7, halaman 5, Yang Mulia.

Lalu, terkait dalil Pemohon A.4 penggunaan fasilitas pemerintah kota untuk kepentingan deklarasi. Bahwa kami, Bawaslu Kota Surabaya melakukan pengawasan non-tahapan karena belum ditetapkan calon, tidak ditemukan dugaan pelanggaran, pada Bukti PK-8.

Lalu, yang berikutnya. Terkait dugaan tindak pidana pemilihan. Bahwa telah dibahas bersama Sentra Gakkumdu pembahasan kedua, kegiatan penyerahan rekomendasi dari DPP PDIP Perjuangan pada pasangan calon yang bertempat pada Taman Harmoni, pada tanggal 2 September belum masuk pada tahapan kampanye. Yang kedua, tidak ada perbuatan atau pun tindakan yang menggunakan kewenangan program atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Yang ketiga, ditemukan kampanye baliho bergambar Eri Cahyadi dan Armuji, beserta Bu Risma, bukan termasuk alat peraga kampanye karena belum ditetapkan sebagai calon, pada Bukti PK-9, halaman 5.

Kemudian, Yang Mulia. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon P.1 tentang jumantik. Izinkan kami pada pengawasan kami pada kegiatan sosialisasi jumantik pada hari Senin, tanggal 20 Januari yang dihadiri oleh Bapak Ir. Armuji, S.H., M.H selaku Anggota DPRD Jatim bersama dengan ibu-ibu jumantik, tidak ditemukan dugaan pelanggaran, Bukti PK-10, halaman 6.

Lalu berikutnya, terkait dengan lampu penerangan jalan pada dalil Pemohon P.2. Bahwa hasil pengawasan kami bersama Panwaslu Kecamatan Bulak, Krembangan, dan Asemrowo, dan Tambaksari sesuai dengan dalil Pemohon, tidak ditemukan dugaan pelanggaran. Terkait dugaan tindak pidana pemilihan bahwa betul ada laporan masuk di Bawaslu Kota Surabaya. Berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu, laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan pada proses penyidikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan. Selaku terlapor dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau melakukan perjan ... penggantian PJU atau lampu penerangan jalan secara rutin dan berdasarkan permohonan RT, RW, sehingga unsur pasal yang disangkakan tidak memenuhi dan tidak dapat dilanjutkan pada proses penyidikan.

Berikutnya, Yang Mulia. Terkait dengan dalil Pemohon P.3 Pavingisasi. Bahwa pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan Bubutan pada tahapan kampanye dan masa tenang, tidak menemukan dugaan pelanggaran pemilihan. Bahwa berikutnya kami juga tidak pernah menerima laporan sebagaimana yang dimaksudkan oleh dalil Pemohon.

Berikutnya, Yang Mulia. Terkait dalil Pemohon P.4 tentang papan reklame. Bahwa kami bersama jajaran panwaslu kecamatan menemukan

dugaan pelanggaran atas alat peraga kampanye yang terpasang oleh masing-masing pasangan calon. Jadi dua-dua pasangan calon juga melakukan pelanggaran dan telah kami sampaikan pada Bukti PK-14.

Lalu kemudian, terkait pada dalil Pemohon, kami tidak pernah menerima laporan sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon.

Berikutnya tentang dalil Pemohon C.1. Tentang surat kepada Menteri Sosial Republik Indonesia, Bawaslu tidak menerima laporan atau temuan terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

Berikutnya, dalil Pemohon C.1b dan C.1c. Kehadiran pasangan calon pada kegiatan pada tanggal ... di kegiatan Program Keluarga Harapan dan Program Bantuan Sosial Beras dari Kementerian Sosial RI. Berdasarkan hasil pengawasan kami, kunjungan Bapak Menteri Sosial pada pukul 12.30 WIB di rumah dinas wali kota. Yang kedua, penyaluran bantuan sosial tunai oleh Menteri Sosial di Kantor Pos Kebon Rojo. Lalu yang ketiga, peluncuran Bantuan Sosial Beras Pembangunan Manusia Program Keluarga Harapan secara simbolis. Pada kegiatan itu, kami Bawaslu Kota Surabaya kami juga tidak menemukan dugaan pelanggaran. Itu kami sampaikan pada Bukti PK ... mohon izin, Yang Mulia ... PK-15.

Berikutnya, dalil Pemohon C.1d. Tentang ketidaknetralan salah satu Ketua Koordinator Kota PKH yang mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan. Kami menerangkan, kami tidak menerima laporan atau pun terkait dugaan pelanggaran tersebut.

Lalu, berikutnya tentang dalil Pemohon D.1 sampai D.4 tentang piagam penghargaan kepada seluruh ketua RT dan RW. Kami juga tidak menerima laporan sebagaimana yang didalil-dalilkan oleh Pemohon.

Berikutnya tentang dalil Pemohon huruf f. Program pemberian makan oleh dinas sosial. Yang pertama adalah kami sampaikan bahwa pengawasan panwaslu kecamatan pada 6 kelurahan di Kecamatan Sawahan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran seperti yang disampaikan oleh Pemohon, pada Bukti PK-16.

Betul bahwasanya kami menerima laporan dari masyarakat berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu, laporan tersebut tidak dilanjutkan sebab ... karena memang itu merupakan program dari Pemerintah Kota Surabaya, lalu kemudian proses distribusinya menggunakan pihak ketiga, dan memang hanya ditemukan 1 stiker dari pasangan calon pada 1 warga yang banyak kemudian dilakukan oleh kepala dinas sosial dan jajarannya.

699. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, masih ... masih banyak ini? Intinya saja.

700. BAWASLU: AGIL AKBAR (KOTA SURABAYA)

3 saja, Yang Mulia, terakhir.

701. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan!

702. BAWASLU: AGIL AKBAR (KOTA SURABAYA)

Kemudian terkait kegiatan kampanye, Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 18 Oktober 2020, kami tidak pernah menerima laporan.

Kemudian, 14. Dalil Pemohon tentang mobilisasi ASN, kami sampaikan bahwa ada ... kita melah ... melakukan penanganan pelanggaran terkait netralitas ASN terdiri dari 1 temuan dan 10 laporan pada Bukti PK-18.

Kemudian yang terakhir, Yang Mulia, pada dalil Pemohon huruf i tentang penegakan hukum pemilu yang tidak berjalan. Kami sampaikan, Bawaslu Kota Surabaya telah menangani dugaan pelanggaran sebanyak 13 temuan dan 58 laporan.

Berikutnya, penjelasan terkait laporan atas nama Saudara Mirathul Mukminin tanggal 20 November. Bahwa laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena sudah dilaporkan oleh Saudara Rahman dengan Nomor Register 23 dan seterusnya.

Lalu kemudian, pada dalil Pemohon I.12. Telah kami sampaikan kepada publik bahwa surat sama dengan A.1a Surat Risma.

Lalu kemudian, pada Pemohon I.13. Sama dengan halaman 7 huruf b halaman 6.

Kemudian yang terakhir, dalil Pemohon I.14. Laporan Pelanggaran Pilkada Pembagian Jilbab Kepada Pemilih. Laporan atas nama Siti Komsah pada tanggal 8 Desember. Kajian awal kami tidak memenuhi syarat formil ... syarat materiil, mohon maaf. Karena tidak ada keterangan waktu dan tempat kejadian, hanya memberikan dokumentasi tanpa keterangan oleh pelapor, sehingga laporan tidak dapat kami registrasi.

Demikian, Yang Mulia, keterangan tertulis kami. Terima kasih.

703. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.
Ada, Prof. Saldi?

704. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini ke Pemohon, ya, di ... saya sudah tandai sebetulnya di ... apa ... di sidang awal dulu. Di halaman 37, Saudara mendalilkan bahwa terhadap masifnya keterlibatan aparat sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Menteri Dalam Negeri, dan seterusnya sudah ... apa ... itu ada buktinya, enggak? Karena tidak ada buktinya di sini.

705. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: VERI JUNAIDI

Ada berita media, Yang Mulia, yang kita lampirkan.

706. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi, kan tidak ada di sini?

707. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: VERI JUNAIDI

Sebentar, Yang Mulia.

708. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di bukti yang diajukan sebelumnya, ada enggak?

709. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: VERI JUNAIDI

Ya, belum masuk bukti.

710. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Belum masuk bukti, ya? Berarti tidak ada bukti. Oke.
Terima kasih, Pak Ketua.

711. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Baik, terima kasih, Bawaslu.
Ya, Yang Mulia? Ada? Cukup? Cukup.
Baik, kalau begitu kita sahkan bukti yang diajukan oleh Para Pihak.

Untuk Perkara Nomor 87/PHP.BUP-XIX/2021 dulu, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-18? Dihidupkan! T-1 sampai dengan T-18?

712. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: MIFTAHUL HUDA

Betul, Yang Mulia.

713. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-18?

714. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021: WAKIT NUROHMAN

Betul, Yang Mulia.

715. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-61?

716. BAWASLU: HASYIM WAHID (KABUPATEN BANYUWANGI)

Betul, Yang Mulia.

717. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Sekarang ini masih ruwet ini untuk Perkara Nomor 88/PHP.KOT.XIX/2021. Saya mulai dari Termohon, PT ... sori, T-1 sampai dengan T-8? T-38, ya?

718. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUDJIATMIKO

Betul, Yang Mulia.

719. KETUA: ARIEF HIDAYAT

T-1 sampai dengan T-38?

720. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: SRI SUGENG PUDJIATMIKO

Betul, Yang Mulia.

721. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ini disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian dari Pihak Terkait, ini masih banyak yang perlu diklarifikasi, tapi intinya PT-1 sampai dengan PT-100.A, ya?

722. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: TOMUAN SUGIANTO HUTAGAOL

Siap, Yang Mulia.

723. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini ada catatan-catatan karena tidak sesuai antara daftar bukti dengan bukti fisiknya, ya.

Kemudian, PT-23, PT-47, PT-72.B, dan PT-81 itu tidak ada bukti fisiknya, ya. Nanti supaya diselesaikan, ya.

724. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: TOMUAN SUGIANTO HUTAGAOL

Siap, Yang Mulia.

725. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, saya sahkan dengan catatan-catatan itu, ya. Nanti kalau ternyata di dalam proses klarifikasi dan verifikasi tidak ada, nanti dilaporkan, berarti dianggap tidak ada itu, ya?

726. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: TOMUAN SUGIANTO HUTAGAOL

Siap, Yang Mulia.

727. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, ini disahkan PT-1 sampai dengan PT-100.A, tapi dengan catatan-catatan. Satu, PT-23 tidak ada. PT-47, PT-72.B, dan PT-81 tidak ada. Yang lain, nanti disesuaikan antara bukti fisik dan daftar buktinya.

KETUK PALU 1X

Disahkan.

Harus satu-satu ini karena banyak catatan. Kemudian, PK-1 Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-25.16?

728. BAWASLU: AGIL AKBAR (KOTA SURABAYA)

Betul, Yang Mulia.

729. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul, ya.

730. BAWASLU: AGIL AKBAR (KOTA SURABAYA)

Mohon izin, ada perbaikan renvoi untuk PK-25.11 ini kami ganti karena kemarin itu adalah PK-25.7. Jadi, satu kecamatan yang sama kita sodorkan, kita ganti dengan kecamatan yang sesuai.

731. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

732. BAWASLU: AGIL AKBAR (KOTA SURABAYA)

Cukup itu.

733. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Diulangi, yang diganti PK-25.11?

734. BAWASLU: AGIL AKBAR (KOTA SURABAYA)

PK-25.11.

735. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu bukti fisiknya diganti?

736. BAWASLU: AGIL AKBAR (KOTA SURABAYA)

Sudah, yang kami ganti PK-25.11. Ini PK-25.11 yang kami bawa sekarang.

737. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, diambil, Mas! Biar dicek sebentar. Itu tadi juga sudah disterilisasi, ya? Oke.

738. BAWASLU: AGIL AKBAR (KOTA SURABAYA)

Sudah, Yang Mulia.

739. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, bukti fisiknya PK-25.11 diganti yang ini yang diserahkan sekarang, ya?

740. BAWASLU: AGIL AKBAR (KOTA SURABAYA)

Betul, Yang Mulia.

741. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Para Pihak, persidangan sudah selesai akan kita laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim untuk diambil putusan bagaimana selanjutnya perkara ini, apakah akan diteruskan atau perkara ini selesai sampai persidangan kali ini.

742. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: VERI JUNAIDI

Mohon izin, Yang Mulia.

743. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

744. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: VERI JUNAIDI

Pemohon Nomor 88/PHP.KOT.XIX/2021, Yang Mulia.

745. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bagaimana?

746. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: VERI JUNAIDI

Mohon izin, Yang Mulia.

747. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa?

748. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: VERI JUNAIDI

Jadi, dari keterangan Para Pihak tadi, ada banyak hal baru yang disampaikan kepada kami, Yang Mulia. Mohon berkenannya kami diberikan kesempatan memberikan catatan, Yang Mulia, sebelum Yang Mulia mengambil putusan.

749. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Eenggak ... anu ... sudah tidak ada catatan dari Pihak Pemohon.

750. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: VERI JUNAIDI

Karena ada banyak hal yang baru, Yang Mulia. Mohon berkenannya kami diberikan kesempatan untuk memberikan (...)

751. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, kesempatan ini adalah kesempatan yang diberikan kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Kalau Pemohon sudah tidak ada, ya. Itu hukum acara kami, ya.

752. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021: VERI JUNAIDI

Betul, Yang Mulia. Kami (...)

753. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, jadi tidak perlu memberikan catatan apapun, ya. Baik, semuanya sudah. Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.56 WIB

Jakarta, 2 Februari 2021
Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

